

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT NELAYAN
DI JAMPUE KAB.PINRANG
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**RUSMAN
NIM: 17.2400.102**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT NELAYAN
DI JAMPUE KAB.PINRANG
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**RUSMAN
NIM: 17.2400.102**

Skripsisebagai salah satusyaratuntukmemperolehgelarSarjanaEkonomi (S.E)
Pada Program StudiEkonomi Syariah FakultasEkonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT NELAYAN
DI JAMPUE KAB.PINRANG
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Program Studi
Ekonomi Syariah**

Disusun dan Diajukan oleh

**RUSMAN
NIM: 17.2400.102**

Kepada

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kelurahan dalam
Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue
Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Rusman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.102

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1086/In.39.8/PP.00.9/7/2020
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. 

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E. 

NIP : 19901223 201503 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Rusman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.102

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1086/In.39.8/PP.00.9/7/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



emil
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikankitasegalarahmat dan hidayah-Nya, shalawatsertasalam yang tak lupakitacurahkan kepada junjungankita Nabi Besar Muhammad SAW yang uswatunhasanah dan selalukitanantikansyafa’atnya di akhiratnanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehatnya, baik secara fisik maupun akal pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua Orang Tua saya tercinta atas dukungan dan doanya sehingga penulis mendapat kemudahan untuk menyelesaikan tugas akademi dengan tepat waktu.

Penulis juga berterima kasih banyak telah menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal said, M.H dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih teriring dan semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. Bapak Dr. M. Ali Rusdi,S.Th.I.M.H.I selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan saya, member nasehat, motivasi, dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Ibu Dr. Rusnaena, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, atas arahannya ehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
5. Kepala kepustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Staf dan Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.
8. Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan beserta para jajarannya, yang telah memberikan bantuan dan kesempatan serta dukungan dalam penelitian ini.
9. Pemerintah Kelurahan Lanrisang Beserta Para Staf, yang telah memberikan bantuan, kesempatan dan dukungan dalam penelitian ini.
10. Para Informan masyarakat Jampue Kabupaten Pinrang
11. Kepada keluarga dari bapak dan ibu penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa yang baik.
12. Kepada Abdi Maris Mursito S.E., Bagus Triantoro S.E., Syarifuddin S.E., Arif Budiman Syahrir S.E., Andi Muhammad Dandi Nugroho S.E., Zulfaslin S.H.,

Muhammad Nur Akram S.E., Andi Muhammad Raehan Luhur, Muhammad Alief Ramadhan, Andi Nur Iksan Reza Wahyudi, Feri Andi yang selalu memberi dukungan, semangat dan bantuan serta doa-doa yang baik.

13. Teman-teman dan sahabat seangkatan dan seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah yang tidak sempat penulis mengucapkan namanya satu persatu
14. Teman- teman dan segenap kerabat.

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terimah kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik dari segi moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Februari 2022
6 Rajab 1443 H

Penulis



RUSMAN
NIM.17.2400.102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 15 November 1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kab.Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 7 Februari 2022

Penyusun



RUSMAN

NIM. 17.2400.102

ABSTRAK

Rusman, *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*, (dibimbing oleh Zainal Said dan An Ras Try Astuti)

Potensi fisik Indonesia meliputi 17.580 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas. Dan dua pertiga wilayahnya lautan sehingga Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam. Di wilayah pesisir kelurahan Lanrisang terdapat sebuah dusun yang sangat dekat dengan pantai yaitu Jampue. Sebagaimana masyarakat yang tinggal di Jampue bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah. Tujuan penelitian ini (1) Mengetahui kondisi perekonomian masyarakat di Jampue Kabupaten Pinrang (2) Mengetahui dampak kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat nelayan di jampue Kabupaten Pinrang (3) Menganalisis peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue berdasarkan analisis ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan akan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). metode pendekatan yaitu fenomenologi dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kondisi perekonomian masyarakat di Jampue sumber pendapatannya berasal dari petani/tambak, pedagang, wirausaha dan kerjaan lainnya. Akan tetapi sebagian masyarakat yang tinggal di Jampue sumber pendapatannya berasal dari nelayan. Pendapatan masyarakat nelayan di Jampue tergolong keluarga sejahtera II dimana dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya juga dapat menyisipkan uang untuk ditabung dan menyisipkan uang untuk membayar keperluan lainnya, Fakto-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh Pemerintah Kelurahan melalui program pemberdayaan nelayan yang dicanankan oleh pemda Kabupaten dan Provinsi serta Pemerintah Pusat membuat masyarakat nelayan sangat terbantu, Peran Pemerintah Kelurahan yang telah membantu kehidupan masyarakat nelayan di Jampue melalui pemberdayaan nelayan walaupun pemerataan yang dirasakan masyarakat belum maksimal. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah Pemerintah Kelurahan telah membantu kemaslahatan umat, jujur, adil dalam mengolah data bantuan nelayan, akan tetapi belum sepenuhnya amanah dalam memberikan bantuan.

Kata kunci: Peran, Pemberdayaan, Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknis Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Kondisi Perekonomian Masyarakat Nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang	34
B. Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Dalam Mencapai Kesejahteraan Oleh Pemerintah Kelurahan di Jampue Kabupaten Pinrang.....	41
C. Bagaimana Peran Pemerintah Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue kab. Pinrang Berdasarkan Analisis Ekonomi Syariah.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Lanrisang	34
4.2	Data Nama Nelayan di Jampue	35
4.3	Data Rata-rata Pendapatan Masyarakat Nelayan di Jampue	38
4.4	Data Kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang	51
4.5	Data Kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang	51
4.6	Data Kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang	52

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara Penelitian	IV
2.	Data Mentah Penelitian	X
3.	Surat Keterangan Wawancara	XIII
4.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XXVI
5.	Surat Rekomendasi Penelitian	XXVII
6.	Surat Keterangan Telah Meneliti	XXVIII
7.	Dokumentasi	XXIX
8.	Riwayat Hidup Penulis	XXX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif ataya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam ransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy- syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab iaberupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulismenjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan: Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihiwasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafattahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

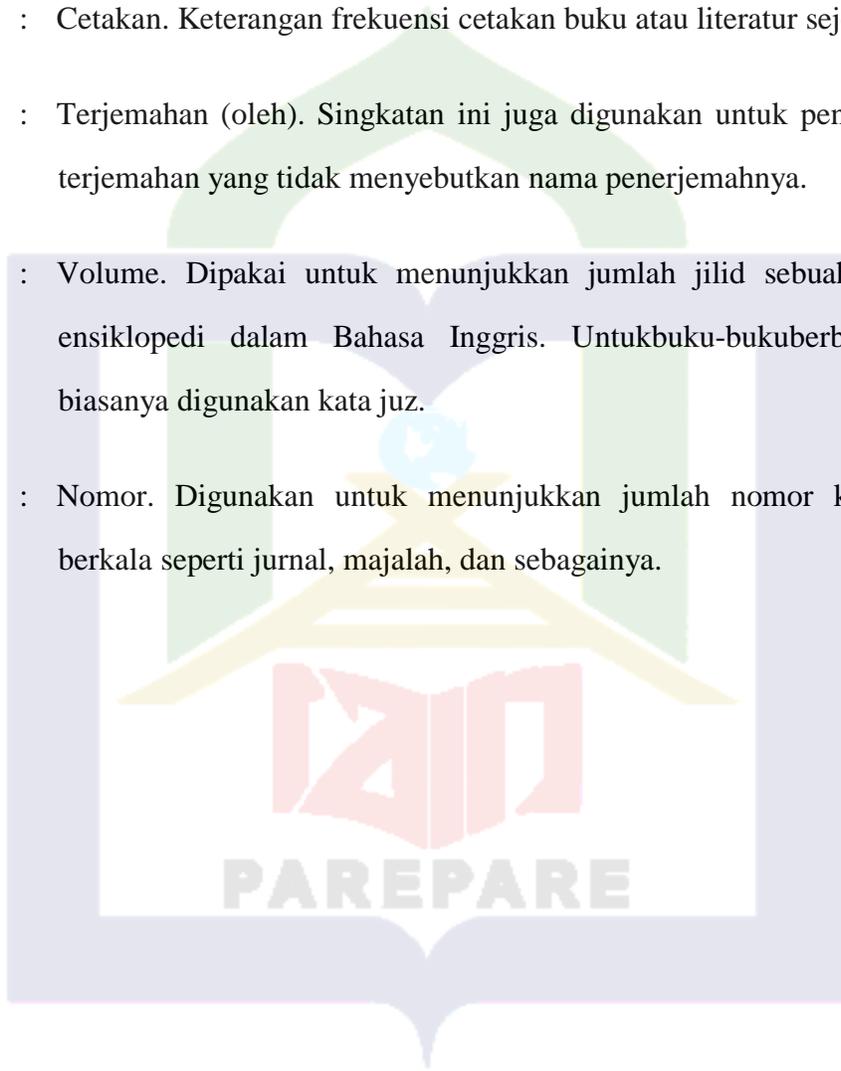
ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya ebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi fisik Indonesia meliputi 17.580 pulau dan garis pantai sepanjang 81.00 kilometer. Keadaan ini berarti Indonesia juga memiliki wilayah pesisir yang sangat luas. Pesisir adalah daerah sepanjang pantai yang mengarah ke laut dan ke arah daratan. Ekosistem pesisir meliputi pantai, muara sungai (*estuary*), padang lamun, terumbu karang, hutan mangrove, hutan rawa pantai, dan perairan lepas pantai (*inshore*).¹

Masyarakat pesisir masyarakat pertanian (masyarakat yang umumnya tinggal di pedesaan) berbeda dalam hal kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan alam. Karena masyarakat pesisir lebih banyak diasosiasikan dengan lautan, sedangkan masyarakat agraris ada yang berupa lingkungan alam seperti persawahan, ladang atau ladang. Dengan kondisi yang bebrbeda ini, memungkinkan mereka memiliki budaya dan sistem pengetahuan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dua pertiga wilayahnya adalah lautan atau 5,8 juta kilometer persegi (580 hektare). Indonesia memiliki potensi kalautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam berupa potensi daerah, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Sumber daya alam, jasa alam dan lain-lain. Sumber daya terbarukan termasuk sumber daya perikanan dan budidaya, potensi biomorfisme non-ikan dan sumber energi tidak konvensional, sedangkan sumber daya tak terbarukan menyediakan energi minyak dan

¹Ahamad Rizal, *Starategi Kebijakan Untuk Mendorong Kinerja Sektor Kelautan*, (Karya Tulis Ilmiah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran,2007),h.19.

gas serta potensi mineral dan harta karun.²

Wilayah pesisir merupakan titik temu dua fenomena lautan dan daratan, dan wilayah ini secara ekologis tidak berkelanjutan karena tergantung pada interaksi berbagai unsur alam untuk membentuk keseimbangan unik ekosistem pesisir. Selain itu, wilayah pesisir merupakan bagaian dari wilayah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar dan diharapkan dapat menjadi akselerator pembangunan ekonomi.

Di wilayah pesisir kecamatan lanrisang, sebagian besar masyarakat yang tinggal di Jampue berasal dari suku bugis, mereka hanya mengandalkan kerja keras atau nelayan untuk mencari nafkah, sehingga sebageian besar mereka tinggal di wilayah pesisir Jampue memiliki perbedaan dalam hal kehidupan sedangkan perbedaan masyarakat pedesaan disebabkan oleh faktor alam karena masyarakat Jampue lebih dekat dengan laut dan masyarakat petani tidak tertarik dengan lingkungan alam berupa persawahan, jagung dan lain-lain.

Jampue Kecamatan Lanrisang merupakan salah satu lingkungan yang ada di Kelurahan Lanrisang letaknya sangat baik dilakukan kegiatan tangkap ikan, karena letak nya yang bagus di pesisir pantai sehingga sangat bagus untuk kegiatan penangkapan ikan bagi yang bekerja atau seorang nelayan. Lokasi Jampue Kecamatan Lanrisang ialah suatu tempat penghasil dibidang perikanan, pertanian dan kelautan.

Memberdayakan masyarakat nelayan di jampue sangatlah penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah beserta perangkatnya, karena meraka sangat berperan penting untuk memberdayakan masyarakatnya, dimana seperti, mendorong dan

²Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h.12.

memotivasi mereka untuk menentukan pola pilihan kehidupannya. Tujuannya Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan ialah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakatnya.

Sebagai nelayan yang masih mempertahankan model hubungan kerja yang interaktif, ia melakukan kegiatan yang membangun hubungan antara nelayan dengan nelayan lainnya, dan memiliki tujuan yang jelas dalam paraktinya, sejalan dengan budaya masyarakat nelayan, seperti gotong royong yang merupakan bentuk dari gotong royong. Masih tersedia beberapa wilayah Indonesia. Indonesia khususnya di wilayah pesisir seperti masyarakat jampue kabupaten pinrang. Kerja sama yang baik, baik secara individu ataupun kelompok, atas dasar saling percaya mereka pergi memancing bersama dan saling membantu dengan nelayan yang berfikiran sama.

Dari hasil observasi awal menjelaskan bahwa yang dirasakan masyarakat nelayan ini adalah kurangnya perhatian dari pemerintah kelurahan dan dalam melakukan sosialisasi atau menyampaikan ke masyarakat di Jampue dalam hal memberdayakan masyarakat nelayan, yang sangat di perlukan untuk mengatasi hambatan yang di alami nelayan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya. Karena masih banyak sebagian masyarakat nelayan di jampue belum merasakan dampak dari pemberdayaan tersebut.³

Sulitnya kebutuhan hidup pada para masyarakat nelayan dusun jampue dalam meningkatkan pendapatannya kadang mereka bisa memenuhi kebutuhannya atau kadang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, karena pendapatannya tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-harinya. Hal lain juga bisa disebabkan oleh modal kerja

³Kadi, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue tanggal 28 Februari 2021.

yang biasa dia gunakan seperti perahu, pancingan dan jaring hanya bersifat secara tradisonal. Sementara ini jam bekerja ketika melakukan aktivitas tangkap ikan bisa saling campur, nelayan pancingan dan nelayan jaring dimana jam beraktivitasnya sangat lama. Biasanya jam kerja nelayan memancing dan menjaring memakan waktu begitu cukup lama sekitar 1-7 jam. Sementara untuk nelayan memukat hanya membutuhkan waktu 1-3 jam atau juga terkadang tergantung dengan pukat yang panjang yang digunakanya. Biasanya para nelayan berankat melaut setelah shalat shubuh atau sesudah shalat dzuhur, kegiatan dalam menangkap ikan ini bisa diulang-ulang dalam satu hari atau tergantung dengan kesanggupan para nelayan dan kondisi alam.⁴

Pemberdayaan masyarakat nelayan itu seperti mewujudkan peluang bagi para masyarakat nelayan untuk menentukan kebutuhannya perkonomian mereka seperti, perencanaan dan melaksanakan kegiatannya pada akhirnya akan menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga peran pemerintah sangat penting juga karena berpengaruh dalam menunjang perekonomian para masyarakat nelayan yang khususnya seperti ada di dusun jampue memberikan pelatihan, bantuan modal ,meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan sumber daya manusia, memberikan bantuan alat tangkap untuk nelayan. Oleh karena itu, melihat realita tersebut menimbulkan pemikiran penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai “peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang (analisis ekonomi syariah)”. Selanjutnya peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan dalam penelitian ini akan dianalisis tinjauan ekonomi syariah. Adapun fokus tinjauan ekonomi Islam dalam penelitian ini yakni

⁴Kadi, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue tanggal 28 Februari 2021

peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan yang diselaraskan dengan prinsip ekonomi syariah yakni prinsip tahuid, amanah, kejujuran, kemaslahatan dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang?
2. Fakto-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh Pemerintah Kelurahan di Jampue Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue berdasarkan ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi perekonomian masyarakat nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang
2. Mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh Pemerintah Kelurahan di Jampue Kabupaten Pinrang
3. Menganalisis peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue berdasarkan ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan pada permasalahan masyarakat di wilayah pesisir Jampue.
 - b) Penelitian ini akan menjadi referensi untuk kegiatan penelitian serupa di masa yang akan datang.
2. Praktis
 - a) Diharapkan dapat memberikan informasi yang konstruktif kepada seluruh masyarakat di wilayah pesisir Jampue yang bermata pencahariannya dominan sebagai nelayan, dan kepada masyarakat nelayan Jampue kecamatan lanrisang kabupaten pinrang khususnya dari segi ekonomi, keuntungan dan kemauan kepada pemerintah kelurahan agar memperkuat masyarakat nelayan khususnya daerah Jampue.
 - b) Diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat nelayan terutama yang berda di wilayah di jampue kecamatan lanrisang kabupaten pinrang.
 - c) Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai cara memberdayakan masyarakat berdasarkan ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Nurfadhilah T dalam penelitiannya yang berjudul “*Peranan Masyarakat Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi di desa Kanje Kecamatan Campalagian Kabupaten polewali Mandar*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, masyarakat nelayan di desa kanje mewujudkan dalam empat perannya baik dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, pendidikan anaka maupun dalam masyarakat.⁵ Persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama akan membahas peranan masyarakat nelayan. Perbedaannya, yaitu membahas mengenai peranan masyarakat nelayan terhadap peningkatan ekonomi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi. Kemudian untuk mengetahui apakah sudah menerapkan prinsip ekonomi islam.

Hamdan dalam skripsinya yang berjudul “*Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jepara dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pesisir*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program PEMP di kabupaten jepara dikatakan cukup berhasil karena terlihat dari segi kelembagaan dengan adanya pembentukan kelompok, mekanisme perguliran dana penyerapan dana bantuan yang

⁵Nurfadhilah T, *Peranan Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Desa Kanje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016).

dapat terlaksana dengan baik. Meskipun masih terkendala dalam pelaksanaan tersebut terutama dari aspek pengembalian pinjaman, akan tetapi program PEMP di kabupaten jepara dari hasil analisis data dalam penelitian ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.⁶ Persamaannya dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti membahas mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi. Kemudian untuk mengetahui apakah sudah menerapkan atau sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Adapun penelitian lain, Jumara Majid dalam skripsinya yang berjudul “*Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Tambak Udang Putih Di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat melalui tambak udang putih di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah dengan adanya budidaya tambak udang putih (*vannamei*) ini masyarakat sangat bersyukur, karena dalam usaha ini peningkatan ekonomi mereka mengalami peningkatan dan bisa menafkahi keluarganya, meskipun di dalam usaha tambak ini ada kendala dalam mengelolanya tetapi masyarakat baik melalui segala kendala itu.⁷ Persamaannya dalam penelitian sama-sama membahas peningkatan ekonomi masyarakat. Perbedaannya membahas

⁶Hamdan “*Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jepara dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pesisir*”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang(2017).

⁷Jurnal Majid “*Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Tambak Udang putih Di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa kabupaten Pinrang*”, (Skripsi STAIN Parepare, parepare 2016)

mengenai peningkatan ekonomi masyarakat melalui tambak udang putih. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti akan membahas peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi. Kemudian untuk mengetahui apakah sudah menerapkan prinsip ekonomi islam.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan Aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸

Menurut Bruce J. Cohen, peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.⁹

Sedangkan Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto, peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting oleh struktur sosial masyarakat.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas, peran merupakan perangkat atau harapan yang

⁸Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara 2002), h.243.

⁹Bruce j. Cohen, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.76.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.213.

dikenakan pada pribadi atau sekelompoknya untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemegang peran sesuai dengan apa diharapkan masyarakat. Setiap individu memiliki macam-macam yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa, peran menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atas lingkungan kepadanya.

b. Unsur-Unsur Peran

Menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur peran ialah:

Aspek dinamis dari kehidupan, Perangkat hak-hak dan kewajiban, Perilaku sosial dari pemegang kehidupan, Bagian dari aktivitas yang dinamakan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat . sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

c. Fungsi Peran

Peran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi
- 2) Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma serta. Pengetahuan
- 3) Dapat mempersatukan kelompok masyarakat, serta,
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori peran bukanlah satu orang, tetapi teori yang selalu berbicara tentang posisi perilaku orang diharapkan darinya dalam kaitannya dengan keberadaan orang lain yang terkait dengan aktor.

Aktor sadar akan struktur sosial yang ditempatinya, sehingga selalu memiliki “kualifikasi” dan diakui sebagai sistem harapan yang ada di masyarakat sebagai “tidak menyimpang” dari aktor lain.¹¹

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Pendukung peran ini menganggap peran ini sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran ini di gunakan sebagai sarana atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Presepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang *responsif* dan *responsible*.¹²

Peran diartikan pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).¹³

2. Pemberdayaan

¹¹Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994), h.3.

¹²Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santoso, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelolah Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003), h.67.

¹³Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h.215.

Menurut Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang ; 2) Meningkatkan potensi dan kekuatan masyarakat; 3) Memberikan perlindungan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan lepas dari kendala kemiskinan keterbelakangan.¹⁴ Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan adalah upaya mencapai kompetensi dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵

Menurut Totok dan Poerwoko, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengendalikan lingkungan untuk mencapai aspirasinya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial dan lainnya.¹⁶

a. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Friedman dalam Munawar Noor, proses pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek upaya dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*) yang dipergunakan yaitu :

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui

¹⁴Bambang Supriyono, et.all., “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)” Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. 4, h. 10-11.

¹⁵Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), h. 81.

¹⁶Zianto, “Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga”, Skripsi: (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjungpinang), h. 3.

langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya,

c. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.¹⁷

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan masyarakat harus mengarah pada persepsi masyarakat yang lebih baik. Pengkondisian kognitif pada dasarnya adalah kemampuan berpikir berdasarkan pengetahuan dan wawasan pribadi atau sosial untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Pengkondisian aktif adalah pengembangan sikap perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi efektif adalah pemahaman tentang apa yang dimiliki masyarakat dan harapan intervensi untuk mencapai pemberdayaan sikap dan perilaku. Kompetensi psikomotor adalah keterampilan yang dimiliki masyarakat yang dirancang untuk mendukung kegiatan pengembangan masyarakat.¹⁸

c. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak berlangsung selamanya, tetapi sampai masyarakat peduli bisa mandiri, bahkan di pelosok, agar tidak jatuh lagi. Dari sudut pandang ini berarti memperkuat proses belajar, tetapi untuk mencapai kemandirian ini, seseorang harus menjaga mental, keadaan, dan kemampuan agar tidak mengalami kemunduran lebih lanjut.

¹⁷Zianto, "Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga", Skripsi: (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjungpinang), h. 4.

¹⁸Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava medika, 2004), h.82.

Sebagaimana telah disebutkan, proses pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap. Fase-fase yang dievaluasi adalah:

- 1) Tahap penyadaran atau perilaku menahan diri dari pergeseran adalah perilaku sadar dan welas asih yang menanamkan dalam diri mereka perlunya pemberdayaan.
- 2) Tahap transformasi kompetensi berupa pengetahuan wawasan, dan keterampilan keterampilan membuka wawasan, keterampilan kemampuan berupa wawasan, memberikan keterampilan penting untuk membuat mereka berguna dalam pengembangan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.¹⁹

d. Prinsip Pemberdayaan

Terdapat 4 (empat) prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya sebuah program pemberdayaan, ialah :

- 1) Prinsip kesetaraan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejahteraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.
- 2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di

¹⁹Azis Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru 2012), h. 34.

evaluasi oleh masyarakat.

3) Kedewasaan atau kemandirian

Prinsip kedewasaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat di atas bantuan orang lain. Konsep ini tidak melihat orang miskin sebagai yang tidak memiliki, tetapi sebagai yang memiliki sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kendala bisnis mereka, memahami keadaan lingkungan mereka, memiliki tenaga kerja dan kemauan, dan memiliki norma-norma sosial jangka panjang untuk dipatuhi

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu direncanakan untuk berkelanjutan sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.²⁰

3. Pemberdayaan masyarakat nelayan

a. Defenisi pemberdayaan masyarakat nelayan

Menurut hikmat pemberdayaan masyarakat tidak hanya harus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harus mampu menambah nilai martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dari masyarakat itu sendiri. Esensi dari gerakan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Pemberdayaan adalah cara memaksimalkan semua potensi ide dan kemauan untuk keluar dari kemiskinan, dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat yang

²⁰Sri Najiatim, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetland International-IP, 2005), h. 54-59.

menyerang mereka. Inovasi kreatif terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan.²¹

Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat atau wilayah aturan tertentu.²² Komunitas berasal dari kata musiarak (Arab) yang artinya bersama maka saya setuju untuk menjadi komunitas.

Masyarakat nelayan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan memanfaatkan potensi pengelolaan sumber daya perikanan. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, masyarakat nelayan memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan penduduk daratan. Di beberapa wilayah pesisir yang berkembang pesat, struktur masyarakatnya heterogen, etos kerjanya tinggi, solidaritas sosialnya kuat, dan ada kemauan untuk berubah dan interaksi sosial. Meski begitu, bagi sebagian masyarakat pesisir, kemiskinan masih tergolong ringan, sehingga fakta sosial terkesan ironis mengingat melimpahnya sumber daya pesisir dan laut.²³

M. Khalil Mansyur menjelaskan bahwa dalam hal ini pemberdayaan masyarakat nelayan adalah mereka yang mengatur kehidupannya sendiri, mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya. Dalam konteks ini, masyarakat nelayan adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan ikan, nelayan rumput laut, dan sebagai pembuat perahu nelayan.²⁴

b. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat nelayan

²¹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humoniora Utama Press, 2001), h.16.

²²Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesian*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 924.

²³Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, h. 13.

²⁴M. Khalil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 2002), h.59

- 1) Pembentukan kelompok kecil yang dapat dilakukan berdasarkan umur yang sama dan sukarela. Pemberdayaan menekankan pada kebersamaan langkah yang memungkinkan kelompok masyarakat dapat berkembang.
- 2) Pemberian tanggung jawab kepada masyarakat, seperti kegiatan perencanaan, penyusunan program sampai dengan evaluasi program yang sudah dilaksanakan.
- 3) Kepemimpinan kelompok dipegang warga masyarakat. Semua kegiatan diatur oleh kelompok, sehingga semua warga masyarakat sebagai anggota memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan.
- 4) Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus berdasarkan musyawarah bersama atau hasil pengumuman suara.²⁵

c. Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan

Tentang hal ini, Sumadyo merumuskan empat upaya pokok pada setiap pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Bina Manusia yaitu upaya yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bina Usaha yaitu suatu upaya dalam setiap pemberdayaan yang memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi.²⁶
- 3) Bina Lingkungan yaitu segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang berada di area kerja.
- 4) Bina Kelembagaan yaitu suatu perangkat umum yang ditaati oleh masyarakat.

²⁵M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h.122

²⁶Sumadyo Samsu, *Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.129

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat

a. Defenisi meningkatkan ekonomi masyarakat

Meningkatkan opini publik adalah munculnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di masyarakat. Penghasilan tidak hanya apa yang dikonsumsi, tetapi juga properti atau uang satu tahun ditambahkan ke hasil yang di capai tahun itu. Peningkatan pendapatan masyarakat mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi di komunitas mereka.²⁷

Pengembangan perikanan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi usaha yang dapat meningkatkan produksi hasil laut yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi, pendapatan asli daerah, dan penyediaan bahan baku, industri perikanan. Peningkatan produksi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, yang akan mendorong pengelolaan ikan dan pertumbuhan perikanan budidaya. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia nelayan merupakan sebagian persoalan di sektor penangkapan.²⁸

b. Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat

- 1) Bantuan pinjaman modal usaha melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan.
- 2) Pembangunan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan.
- 3) Pelatihan keterampilan usaha ekonomi.²⁹

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

- 1) Pendidikan

²⁷Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi II. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.134.

²⁸Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humaniora Utama Press 2001), h.123

²⁹Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009),h.57

Pendidikan seseorang ini sangat berpengaruh terhadap pekerjaan. Jika pendidikan lebih tinggi maka jenis pekerjaan juga akan tinggi pula, sehingga hasil tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh masyarakat.

2) Umur

Umur yang kisaran 15-64 tahun merupakan umur yang ideal bagipara pekerja, sehingga semakin bertambah umur seseorang maka pendapatannya akan semakin meningkat, tetapi tergantung dari pekerjaan seseorang yang apa dilakukan.³⁰

3) Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan ini juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang, jadi pendidikan dan keterampilan itu sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang akan dilakukan seseorang.

d. Sebab-sebab kemiskinan nelayan

Menurut Kusnadi ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan sebab yang bersifat eksternal. Kedua sebab itu tersebut saling berinteraksi dan melengkapi.

Penyebab internal meliputi masalah berikut:

- 1) Kualitas SDM nelayan terbatas.
- 2) Keterbatasan modal dan kapasitas teknis penangkapan.
- 3) Hubungan kerja dalam organisasi penangkapan ikan (pemilik kapal dan buruh nelayan) yang dianggap kurang menguntungkan bagi buruh nelayan.
- 4) Peadilan diversifikasi bisnis penangkapan.

³⁰Yunita, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h. 254.

- 5) Sangat tergantung pada perikanan
- 6) Gaya hidup yang dipandang sebagai kemewahan dan karenanya kurang tahan terhadap masa depan.

Penyebab eksternal meliputi masalah:

- 1) Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih menitikberatkan pada produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagainya.
- 2) Sistem pemasaran hasil laut yang lebih menguntungkan bagi tengkulak
- 3) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat pencemaran darat, penangkapan ikan secara kimiawi, perusakan terumbu karang, dan perlindungan hutan di wilayah non-pesisir.
- 4) Gunakan alat tangkap yang tidak ramah.
- 5) Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan.
- 6) Terbatasnya pengolahan hasil tangkapan pascapanen.
- 7) Terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan.
- 8) Kondisi alam dan fluktuasi musim tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia.³¹

5. Analisis Ekonomi Syariah

Analisis merupakan proses pemecah suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Analisis ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yaitu:

- 1) Tauhid

³¹Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009),h.70.

Prinsip tauhid merupakan bagian dari setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Quraisy Shibab menjelaskan bahwa tauhid membuat orang-orang dalam kegiatan ekonomi percaya bahwa kekayaan apa pun yang mereka miliki adalah milik Allah. Keyakinan seperti itu membuat umat Islam menyatakan doa saya, ibadah saya, hidup dan mati saya hanya untuk Allah, Tuhan dunia. Keyakinan dan pandangan hidup seperti itu secara bersamaan mengarah pada kepercayaan yang seimbang di dunia dan akhirat, dan wirausahawan melakukan lebih dari sekedar mengajarkan minat materi. Kesadaran juga mengenal pengusaha dan pengusaha Islam dan mengatur untuk menghindari eksploitasi segala bentuk sesama manusia.³²

2) Amanah

Amanah adalah kebalikan dari pemberontakan. Amanah berasal dari bahasa Arab, Amna dan Yumna. Amanah artinya dapat dipercaya, jujur, lugas, dan setia. dari akar yang sama, kata Yumna, amina yang berarti perdamaian, terbentuk. Kata iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan Amana: mana, yaminu, dan imman.³³

3) Kejujuran

Jujur adalah terjemahan dari kata *Shiddiq* dalam bahasa Arab yang berarti benar dan dapat dipercaya. Dengan bahasa lain jujur merupakan perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan diikuti dengan perbuatan yang selaras. Dengan demikian kejujuran artinya keselarasan antara perkataan dari perbuatan dengan kebenaran sifat jujur adalah sifat nabi dan rasul yang memberikan teladan kepada setiap ummatnya secara khusus dan umumnya kepada seluruh manusia didalam menjalani kehidupan agar menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran.

³²Mursal dan suhadi, *Implementasi Prinsip Islam Danal Aktivitas Ekonomi* (Sumatra barat: Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2015), Jurnal penelitian , vol.9, No. 1, h.71.

³³Mahmud yunus, *kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, t.t.) h. 49.

4) Kemashlahatan

Secara sederhana, mashlahat dapat dijelaskan bahwa mengambil manfaat dan menolak kedaratan.³⁴ Atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan faedah atau guna.³⁵

5) Keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.³⁶ Di antara pesan-pesan Al- Qur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah keadilan, kata adil berasal dari kata Arab Adl yang secara harfiah bermakna sama.

Prinsip keadilan banyak mengandung makna dalam semua kegiatan ekonomi karena ia harus bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan hukum di dalam agama islam dan didalam hukum muqanniyang menyatakan yaitu sebagai para rasul yang telah diutus oleh Allah swt ialah tujuan yaitu untuk mengatur kehidupan para manusia diatas keadilan atau didalam norma-norma hukum, karena tanpa hukum para masyarakat akan sangat kacau.

C. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran merupakan harapan-harapan yang dilaksanakan para individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat

³⁴Abu Hamid al-Gazali, *al- Mustashfa min'ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al-'ilmiyah, 1983), h. 139.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1 Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama 2008), h. 884.

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1 Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama 2008), h. 884.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri untuk menggali kemampuan individu, kreativitas, kemampuan dan keterampilan berpikir serta untuk tindakan yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pemerintah

Pemerintah kelurahan merupakan unit pelayanan pemerintah pemberdayaan masyarakat yang terdepan dan langsung serta merupakan tonggak utama keberhasilan semua program pemerintah.³⁷ Penguatan kelurahan merupakan upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan melayani masyarakat, selain kedudukan kelurahan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kelurahan, ketersediaan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta ketersediaan sumber daya manusia yang dapat melayani masyarakat perlu ditingkatkan dan ditentukan.

4. Nelayan

Nelayan adalah sekelompok orang yang mata pencahariannya bergantung langsung dengan pada hasil laut, baik yang menangkap ikan maupun bertani. Mereka biasanya tinggal di pantai, kawasan pemukiman yang dekat dengan tempat mereka bekerja³⁸

³⁷Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*, (Jakarta : Bada Penelitian dan Pengembangan Komendagri, 2014), cet. Ke-1, h.112

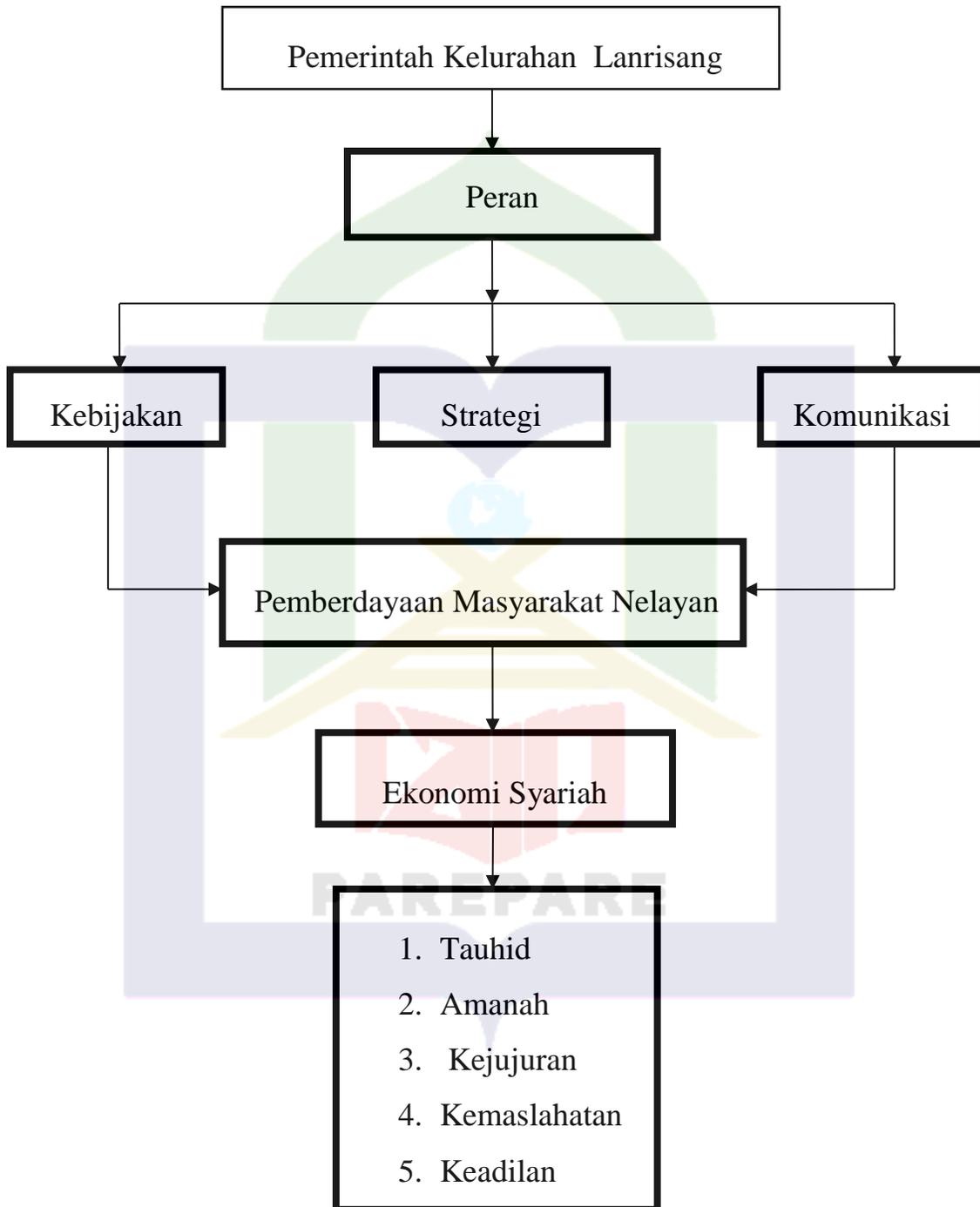
³⁸Mulyadi, *Polemik Kemiskinan Nelayan* (Jogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2007) h. 7.

D. Kerangka Pikir

Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan meemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Pada kerangka Kerangka piker ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek kerangka berfikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Dari permasalahan yang diangkat, bahwa peneliti akan meneliti mengenai bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue (analisis ekonomi syariah).

Fokus penelitian ini merupakan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue Kab. Pinrang. Dan penulis ingin mengetahui memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue apakah sudah menerapkan atau sesuai dengan prinsip ekonomi syariah/islam. Maka dengan ini peneliti menemukan kerangka fikir berikut ini yang menggambarkan fokus penelitian dan yang dicapai peneliti.

Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mangacu pada pedoman penulisan karya ilmiah (paper and paper) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku ini mencakup beberapa bagian, antara lain jenis survei, lokasi dan waktu survei, fokus survei, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya yang diangkat oleh peneliti, penelitian ini menggolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini berupaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, dan mengintreprestasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁰

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi⁴¹. Adapun pendekatan yaitu pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi menjelaskan kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui pertanyaan pancingan, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa. Studi fenomenologi bersumsi bahwa setiap individu

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.22-23.

⁴⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.26.

⁴¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), h.6.

mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain Studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek yang diadakan dalam sebuah penelitian. Adapun waktu penelitiannya ialah jangka waktu kegiatan penelitian berlangsung.

1. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh terkait dengan peran pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat nelayan yang berlokasi di Jampue kecamatan lanrisang kabupaten pinrang.

2. Waktu penelitian

Selang durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti didalam penyusunan penelitian, sekurang-kurangnya 2 bulan.

C. Fokus penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue Kab. Pinrang. Dan penulis ingin mengetahui memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue apakah sudah menerapkan atau sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data merupakan data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif berupa informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata-kata kalimat. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua :

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis pengumpulan data dari sumber yang asli atau peneliti memperoleh data tanpa melalui prantara. Data langsung diambil dari subyeknya sebagai sumber informasi yang dicari. Proses pengambilan data dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data

Data penelitian ini ialah data yang didapatkan atau diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Dinas Perikanan dan Kelautan , Pemerintah Kelurahan, perangkat Kelurahan dan beberapa Masyarakat Nelayan di Jampue.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung aatau diperoleh tidak berasal dari subyek penelitian. Data yang diperoleh sebagai data perlengkapan sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa medi seperti buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* ialah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan yang kemudian dijawab oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan dalam bentuk penganggungjawaban penelitian ini, baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto, dan data-data langsung yang diperoleh dari masyarakat dusun jampue yang berprofesi sebagai nelayan.

3. Observasi / pengamatan alami

Observasi merupakan pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁴² Observasi merupakan mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁴³

Peneliti mengetahui suatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan sehingga merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan atau merasakan sendiri. Peneliti akan turun langsung untuk mengamati objek yang akan diteliti dengan melihat langsung proses peran pemerintah keluraha dalam memberdayakan masyarakat nelayan di jampue.

⁴²Sanapiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Cet.V; Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2011), h.71.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta , 2006), h. 230.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan pertemuannya dapat dicapai; *kedua*, memepertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴⁴ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴⁵ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa *triangulasi*, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data atau memanfaatkan berbagai metode agar kepercayaan data dapat dilakukan.⁴⁶

⁴⁴Lexy J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.324.

⁴⁵Lexy J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.330.

⁴⁶Lexy J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.332.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang tidak perlu.⁴⁷ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan megorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field note*). Data “mentah” merupakan data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasi secara numerik.⁴⁸ Adapun data “mentah” yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah peneliti. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.⁴⁹

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa informan di Jampue, karena jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur, Hal ini dilakukan untuk memilih data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni prinsip-prinsip ekonomi syariah yang

⁴⁷Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015), h. 122.

⁴⁸Murry R.Spiegel dan Larry J.Stephans, *Statistik*,(Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga,2015), h.30.

⁴⁹A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media,2016) h.406.

diterapkan dalam peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatd dusun jampue kabupaten pinrang.

b) Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁵⁰

Semua informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa sumber data dan studi dokumentasi akan digabungkan. Yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulannya dan menjadi bermakna.

c) Verifikasi Data

Kesimpulan atau validasi merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan dapat diterik dengan membandingkan validitas pernyataan yang dibuat oleh subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian.⁵¹

⁵⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h.123.

⁵¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

Kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat tentatif dan akan diubah jika ditemukan bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses pengumpulan bukti ini kadang-kadang disebut sebagai validasi data. Kesimpulan yang diperoleh dikatakan kredibel jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan pada saat peneliti kembali lapangan..⁵²

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut bersal dari hasil wawancara pemerintah dan nelayan serta dokumen yang diperoleh peneliti di kator kelurahan lanrisang dapat dipercaya. Tinjauan data mengutamakan efektivitas sumber data, tingkat objektivitas, dan keterkaitan antara data dari satu sumber ke sumber lainnya sebelum peneliti menarik kesimpulan.

⁵²Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan, dan Jenis, (Jakarta: Kencana, 2019.),h.117.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Perekonomian Masyarakat Nelayan Di Jampue Kabupaten Pinrang

Kondisi perekonomian adalah kondisi yang ada dalam kehidupan seseorang yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang mencari pendapatan untuk menafakan rumah tangga mereka. Karena pendapatan itu adalah hasil kerja keras seseorang yang diperoleh kepala rumah tangga atau anggota keluarga.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa di dusun jampue sebagian mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian nelayan dan ada juga sebagai tambak, petani, pedagang ,pegawai negeri sipil (PNS) , non (PNS) dan lain-lain sebagainya.

Tabel.4.1 Data kondisi ekonomi berdasarkan mata pencaharian di Kelurahan Lanrisang 2021

No	Uraian	Jumlah
1.	Pekerjaan	
	A. Petani	294
	B. Nelayan	187
	C. Buruh Nelayan	8
	D. Perdagangan	3
	E. PNS	23
	F. Polisi	2
	G. PerangkatKelurahan	6
	H. Lain-lain	73

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi wawancara,2021)

Deskripsi mengenai data nama masyarakat nelayan di Jampue Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada pada 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Data nama masyarakat nelayan di Jampue kelurahan lanrisang

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Muh. Tahir	40	Nelayan	Jampue
2.	Morsali	41	Nelayan	Jampue
3.	Terang	42	Nelayan	Jampue
4.	Nurdin	38	Nelayan	Jampue
5.	Sarifuaddin	50	Nelayan	Jampue
6.	Jamal	48	Nelayan	Jampue
7.	Sardin	37	Nelayan	Jampue
8.	Gaffar	35	Nelayan	Jampue
9.	Saleng	43	Nelayan	Jampue
10.	Munir	30	Nelayan	Jampue

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi wawancara,2021)

Berdasarkan tabel.4.2. menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat jampue adalah nelayan, Dengan didukung lokasi yang berada dipinggir laut menjadikan sebagian besar masyarakat jampue berprofesi sebagai nelayan. Sebagian besar nelayan menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar, karena dulunya pendidikan nelayan jampue bukanlah prioritas masyarakat tetapi bagaimana cara

bertahan hidup dan dapat menafkahi keluarganya. Dari observasi awal yang telah dilakukan bahwa masyarakat yang sebagian besar pula telah menjadi nelayan ketika berumur 13 tahun dan ikut menjadi nelayan dalam membantu orang tua sehingga pendidikan harus terputus. Seperti hanya yang dijelaskan staf kelurahan lanrisang bahwa:

“Mata Pencaharian masyarakat disini adalah nelayan, walaupun orang yang bekerja dibidang seperti petani, pns, pedangan dan lainnya mayoritas dari mereka bekerja sebagai nelayan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. karena sebagian masyarakat di jampue mungkin mereka memilih bekerja sebagai nelayan karena jarak rumah dan laut itu sangat dekat atau mungkin juga mereka diajak sama teman mereka.mungkin para nelayan itu mempunyai keahlian dalam melaut seperti mereka membuat perahu, jaring dan alat tangkap ikan lainnya”⁵³

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan dari perangkat kelurahan dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari masyarakat di jampue ini berprofesi sebagai nelayan. Disamping sebagai nelayan iya juga memiliki pekerjaan sampingan untuk menghidupi kebutuhan keluarga mereka.

Nelayan merupakan pekerjaan yang sejak dulu sudah dilakukan oleh masyarakat karena merupakan kerjaan pokok bagi masyarakat untuk menghidupi kebutuhan perekonomian keluarga, namun semenjak perkembangan zaman sudah banyak sekali kerjaan yang bisa di kerjakan oleh masyarakat sebagai kerja tambahan/sampingan untuk menambah pendapatan mereka. Dimana kebutuhan sekarang ini sudah meningkat jadi masyarakat sudah banyak mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Seperti halnya yang diungkapkan Sarifuddin masyarakat nelayan mengatakan bahwa:

“Iya sebagai nelayan, saya masih mempunyaai tanggungan 3 anggota keluarga biasanya pergi melaut itu memakai waktu 7 jam. Sedangkan pendapatan ku

⁵³Nurmiyati Staf Kelurahan Lanrisang, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 02 September 2021

selama pergi nelayan itu tidak menentu yang didapat kalo ada rezeki didapat kujual mi kepasar walaupun sedikit asal bisa mi beli beras. karna biasa dalam satu hari itu biasa tidak ada sama sekali di dapat ikan jadi bagaimana ka bisa membantu perekonomian keluarga ku.jadi makin susah saja perekonomian ku”⁵⁴

Sama halnya yang di ungkapkan Gaffar bahwa:

“Iya nelayan. Sedangkan saya tidak punya kerja sampingan kalau pendapatan itu tidak ada yang menentu hasilnya ,misalaya kadang tidak ada dalam seminggu biasanya juga langsung banyak di dapat begitu ji.”⁵⁵

Berdasarkan dari hasil kedua wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapatan seorang nelayan yang hanya mengandalkan hasil melautnya saja dalam meningkatkan perekonomian keluarga mereka belum cukup, karena terkadang pendapatan nelayan terkadang tidak menentu, sehingga kebanyakan masyarakat nelayan mencoba mencari kerja sampingan demi kebutuhan keluarga

Sebagai mana halnya yang di ungkapkan Munir seorang nelayan mengatakan bahwa:

“Kalau hasil nelayan ji itu diandalkan dalam membantu kebutuhan sehari tidak mungkin kami sanggup, karena kadang hasil memancing tidak ada sama sekali di dapat”⁵⁶

Sama halnya yang di ungkapkan dodding bahwa:

“Iya dek, kadang pendapatanku dari memancing itu tidak menentu biasanya itu saya beraangkat sore baru pulangya pagi, kadang yang didapatkan itu tidak menentu bisa saja tidak ada di dapat sama sekali.jadi kalo kami andalkan saja hasil laut saangat sulit untuk membantu kebutuhan keluarga.jadi biasa saya pergi cari kerja-kerja sampingan untuk membantu kebutuhan keluarga”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara kedua wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjaan pokok seorang nelayan dalam menghidupi kebutuhan perekonomian keluarga,walaupun kadang mereka bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari atau tidak. Namun mengikuti perkembangan zaman sudah banyak sekali kerjaan yang bisa di kerjakan oleh masyarakat seperti kerja tambahan/sampingan untuk

⁵⁴ Sarifuddin masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 01 September 2021.

⁵⁵ Gaffar masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 02 September 2021.

⁵⁶ Munir masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 02 Setember 2021

⁵⁷ Dodding, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 02 September 2021

menambah pendapatan mereka dan semakin naik juga kebutuhan keluarga yakni harga pokok naik, pendidikan anak dan lain sebagainya.

Deskripsi mengenai rata-rata pendapatan para masyarakat nelayan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3. Pendapatan rata-rata masyarakat nelayan di Jampue Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Rata-rata pendapatan nelayan (Rupiah)	Jumlah	Presentase
> 1.000.000	0	0%
100.000- 500.000	7	65%
< 100.000	3	35%

Sumber Data: Data Primer (Hasil Observasi 2021)

Berdasarkan dari jawaban diatas merupakan data hasil wawancara peneliti kepada masyarakat nelayan dusun jampue penghasilan yang di peroleh kepala rumah tangga maupun anggota keluarga, dimana pekerjaan yang dilakukan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama periode satu bulan, penghasilan biasanya dibutuhkan untuk keperluan keluarga seperti konsumsi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Menurut Todaro dari Stephen Smith, kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran dari hasil pembangunan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.⁵⁸ pertama, meningkatkan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; kedua, untuk meningkatkan standar

⁵⁸Todaro, Michael P, dan Stephen, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.305.

hidup, tingkat pendapatan, dan pendidikan lebih baik dan ketiga, untuk memperluas ketersediaan skala ekonomi dan pilihan sosial individu dan negara. Indikator yang digunakan untuk mengetahui status ekonomi masyarakat nelayan di Jampue adalah:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh setiap kepala rumah tangga maupun anggota keluarga, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi didalam satu bulan lamanya. Penghasilan biasanya digunakan untuk keperluan keluarga seperti konsumsi, pendidikan maupun kesehatan. Adapun jumlah penghasilan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel tersebut.

Berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan, dimana tidaklah selamanya seorang nelayan pergi melaut karena biasanya juga terhalang dengan kondisi cuaca yang kadang cuaca baik dan terkadang juga sehingga nelayan terpaksa tinggal dirumah dan melaksanakan hal yang tidak pasti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sardin seorang nelayan mengatakan bahwa:

“Kalo saya tidak pergi melaut palingan saya hanya dirumah untuk mengerjakan apa saja yang bisa saya buat. Saya hanya dirumah buat alat pancingan, atau kadang saya pergi membersihkan kapal dan membantu istri menjaga anak.tpi kami itu tidak pergi apabila angin kencang dan hujan deras jadi tidak pergi malaut, kalo cuma gerimis ji terkadang kami pergi moki yang penting bukan ji angin kencang”⁵⁹

Lain halnya yang diungkapkan Muh. Tahir hasil dari keterangan wawancara peneliti, bahwa:

“Iya dek setiap sudah subuh itu berangkat maka pergi memancing pulangnyanya itu kayak maupi ashar, karna dari penghasilan nelayan saja itu tidak menentu pendapatanku kadang ada kadang tidak itupun kalo cuaca tidak baik tidak pergi saka memancing. Apalagi ada masalah sama perahu biasanya perahu bocor, pancingan rusak ,mesin ndak mau menyalah belum lagi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga ku. Tapi kalo dari kerja sampingan ku itu pangkas rambut alhamdulillah bisa ji memenuhi kebutuhan keluarga ku”⁶⁰

⁵⁹Sardin masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 02 September 2021.

⁶⁰Muh. Tahir masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 30 Agustus 2021.

Berdasarkan pemaparan dari kedua hasil wawancara diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari hasil nelayan dalam meningkatkan kebutuhan sehari-hari belum cukup untuk keluarga, karena terkadang dari hasil nelayan tersebut kadang pendapatan tidak menentu.

Seperti halnya di ungkapkan oleh Nurdin salah seorang nelayan di Jampue hasil keterangan wawancara, mengatakan bahwa:

“Iya setiap sudah subuh itu kami berangkat kadang juga kami berangkat sore pulangny subuh. Dimana pendapatan ku itu pergi memancing dalam 1 bulan bahkan sampai 2 bulan kadang tidak ada sama sekali bagaimana maka bisa membantu perekonomian keluarga sehari-hari. Apa karna tergantung juga dari ikan kalo manrei bale angka yakko degaga degaga. Karna kerja sampingan ku tidak jadi dari hasil memancing ku saja ku andalakan.”⁶¹

Hal ini juga di ungkapkan Jamal salah seorang nelayan di Jampue hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

“Iya karna pendapatan ta juga ini bergantung sama kondisi cuaca dan ikan seperti sementara memancing maki langsung hujan dan angin kencang pasti langsung pulangki na blom ada ikan di dapat bagaimana mi carata menambah penghasilan tidak ada mi pergi dijual. Karena pendapatan nelayan pinggirannya hanya biasa kadang 100.000-500.000 dari hasil jual ikan. sedangkan klo kerjaan sampingan ku itu tidak ada jadi penghasilanku bergantung nelayan ji”⁶²

Sama halnya di ungkapkan saharuddin bahwa:

“Pendapatan ku itu setiap pergi memancing tidak menentu artinya biasa ada biasa juga tdk ada. Karna nelayan pinggirannya itu tidak seberapa penghasilannya. Kalo misalnya ad kudapat ikan na tidak terlalu banyak palingan itu ikan tidak kujual kepasar. Karna penghasilan biasanya kadang Rp.30.000, biasanya juga kadang bisa sampai Rp.50.000 tergantung juga rezeki.”⁶³

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dapat disimpulkan pendapatan adalah faktor utama dalam keluarga walaupun pendapatan tidak begitu banyak yang penting cukup untuk keluarga. Karena rezeki juga sudah ada yang mengatur sehingga cukup berdoa dan berusaha dalam menjalankan pekerjaan.

⁶¹Nurdin masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 30 Agustus 2021

⁶²Jamal masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 01 September 2021.

⁶³Sarifuddin masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 30 Agustus 2021

Lain halnya yang jelaskan oleh Teran salah satu dari masyarakat nelayan di Jampue keterangan dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa:

“Saya juga kerjaanku sebagai nelayan saja kalo kerja sampingan ku itu tidak jadi hanya dari hasil nelayan ku ji kuandalkan. Dimana biasanya penghasilan nelayan ku alhamdulillah bisa ji membantu perekonomian ku sedikit-sedikit. Selain dari hasil nelayan ku biasanya anak ku yang kerja diluar kota biasanya nakirimkan ka juga uang untuk membantu kebutuhan dan keperluan kami disini sekeluarga.”⁶⁴

Hal senada diungkapkan Saleng menyatakan bahwa:

“Iya dek kondisi perekonomian keluarga alhamdulillah bisa baik karena bantuan juga dari anak-anak yang kerja di luar daerah sperti pergi merantu jadi biasanya itu dia kirim uang perbualan.”⁶⁵

Berdasarkan data dari hasil semua wawancara observasi peneliti yang telah dilakukan dapat kita pahami bahwa penghasilan masyarakat nelayan itu biasanya sebesar Rp. 100.000 sampai dengan Rp 500.000 dimana 1.000.000 sangat besar sekali. Seperti halnya bahwa masyarakat dusun Jampue yang bekerja sebagai nelayan adapun yang juga memiliki pekerjaan tambahan, dan ada juga hanya mengandalkan dari hasil nelayan saja akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga kita dapat ketahui masyarakat nelayan dusun Jampue ada juga yang berpenghasilan sedang dan ada juga yang kurang pedapatannya.

B. Fakto-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh Pemerintah Kelurahan di Jampue Kabupaten Pinrang

Pemberdayaan masyarakat nelayan sesuai kearifan pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya harus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat, kepercayaan dan harga diri, serta menjaga nilai budaya masyarakat. Gerakan dalam pembangunan terletak pada potensi dan kemauan

⁶⁴Terang masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 30.Agustus 2021.

⁶⁵Saleng, masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 30 Agustus 2021.

untuk keluar dari kemiskinan yang diserang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang majemuk. Inovasi kreatif untuk lingkungan tentunya menjadi dasar untuk menginisiasi pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.⁶⁶ Berdasarkan “Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 3 menyatakan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum”.⁶⁷

Berdasarkan data dari hasil observasi dapat dilihat faktor-faktor pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan Pemerintah Kelurahan untuk masyarakat nelayan di Jampue yang bertujuan untuk melindungi masyarakat nelayan

⁶⁶Harry Hikmat, *Starategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta:Humaniora Utama Press, 2001) h.16.

⁶⁷Repubilk Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*.”

oleh pemerintah kelurahan dengan menjalankan UU No. 7 Tahun 2016 dengan berupaya untuk melindungi ekonomi yang lemah melalui kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Adapun faktor-faktor yang terjadinya setelah adanya pemberdayaan nelayan di Jampue yaitu:

1. Faktor kesejahteraan Nelayan

Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti Pemerintah Kelurahan mengeluarkan dampak adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat guna membantu para nelayan seperti meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bentuk pemberdayaan nelayan tersebut Pemerintah Kelurahan ini dimana semua nelayan di jampue dapat meningkatkan perekonomian. Seperti halnya yang dijelaskan kepala kelurahan lanrisang dari hasil keterangan wawancara peneliti bahwa:

“Nelayan dapat peningkatkan kesejahteraan akan meningkat dimana itu secara gampang ceritanya hasil tangkapannya langsung memasarkakan dijual lalu dijadikan mi rupiah.”⁶⁸

Sama halnya di jelaskan Nurmiyati staf kelurahan bahwa:

“Iya memang betul dengan adanya pemberdayaan nelayan sangat banyak dampak yang diperoleh masyarakat nelayan serta masyarakat nelayan dapat mengikuti kegiatan proses pemberdayaan dan dapat menambah pengetahuan dan memajukan kehidupan bersama-sama. Seperti hasil tangkapnya itu dipasarkan langsung biasa pemasaraanya di bawah kepasar atau di bawa ke juragan ikan”

Dengan adanya pemberdayaan nelayan ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat nelayan. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan nelayan ini merupakan tugas untuk pemerintah kelurahan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Jampue, dengan ini masyarakat nelayan dapat merasakan dampak dari kebijakan pemberdayaan nelayan tersebut. Seperti peningkatkan kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya.

⁶⁸Firman Sahudin S.H. M.AP ,Kepala Lurah, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 08 September 2021

Dari pernyataan tidak dapat dipungkiri oleh nelayan yang sudah merasakan dampak pemberdayaan nelayan dengan bertambahnya sedikit pendapatannya. Hal ini disampaikan oleh seorang nelayan mengatakan bahwa:

“Saya pikir dengan adanya pemberdayaan nelayan ini sangat membantu dalam soal penghasilan seperti bisa digunakan dalam keperluan pendidikan anak-anak, dana kebutuhan sehari-hari dan anak-anak bisa memiliki kesempatan untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi.”

Sama seperti yang diungkapkan oleh Jamal salah seorang nelayan di Jampue mengatakan bahwa:

“Pendapatan yang saya peroleh dengan adanya pemberdayaan nelayan sangat membantu kebutuhan keluarga baik dalam pendidikan anak dan kehidupan sehari-hari.”⁶⁹

Berdasarkan dari jawaban diatas peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat nelayan para nelayan dapat meningkatkan pendapatan, pengetahuan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pemberdayaan nelayan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat nelayan di Jampue dan dapat bersosialisasi dan saling mengenal secara luas dengan para anggota nelayan. Hal ini di ungkapkan salah seorang nelayan Saharuddin, mengatakan bahwa:

“Ketika adanya pemberdayaan nelayan tersebut kami mengajak para nelayan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut agar semua nelayan dapat merasakan dampak pemberdayaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kebutuhan sehari seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok dan lain sebagainya”⁷⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dampak adanya kebijakan pemberdayaan nelayan juga berdampak dengan keadaan sosial masyarakat nelayan seperti tingkat kesejahteraan keluarga nelayan sehingga mereka dapat membiayai pendidikan anak, kebutuhan pokok dalam sehari-hari.

⁶⁹ Jamal masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 12 Desember 2021.

⁷⁰ Saharuddin masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 12 Desember 2021.

2. Faktor perekonomian masyarakat

Maksud dari peneliti mengatakan perekonomian ialah penghasilan yang didapatkan masyarakat nelayan setelah adanya bantuan pemberdayaan nelayan dari pemerintah seperti adanya program nelayan tersebut sehingga masyarakat nelayanmerekabisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Saleng salah satu masyarakat nelayan dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

“Iya dengan adanya pemberdayaan masyarakat nelayan seperti pelatihan pemberian alat tangkap dan sosialisasi itu pedapatan ku itu sedikit demi sedikit meningkat, karena dimana sebelumnya itu kadang didalam satu hari itu kadanag kalo saya pergi melaut kadang tidak ada sama sekali saya dan kemudiaan itu saya bingung dimana maka dapat penghasilan lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ku ini bersama keluarga saya karena jika hanya mengandalkan dari hasil pergi melaut/memancing saja, itu tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga jadi saya mencoba mencari pekerjaan sampingan saja seperti tukang batu dan lain sebagainya.”⁷¹

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas ia mengatakan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat nelayan di Jampue yang dilakukan pemerintah kelurahan untuk masyarakat nelayan itu sehingga nelayan dapat merasakan dampak tersebut seperti penghasilan para nelayan.

Seperti halnya yang diungkapkan munir salah seorang nelayan di Jampue hasil keterangan wawancara, mengatakan bahwa :

”Dengan adanya pemberdayaan masyarakat nelayan itu mengakibatkan pendapatan kebutuhan sehari –hari saya itu sedikit meningkat pendapatannya karena sebelum nya itu pendapatan saya itu menurun sehingga suami saya itu mencari kerja tambahan untuk mendapatkan penghasilan.apa kalo dari hasil melaut saja diadalakan juga tergantung dari kondisi cuaca sama ikan.”⁷²

Sama halnya di ungkapkan Tahir salah seorang nelayan di Jampue hasil keterangan wawancara, mengatakanbahwa:

“Iya dengan adanya pemberdayaan nelayan ini seperti bantuan baik alat tangkap atau kartu nelayan seperti saya ini punya kartu nelayan dengan kartu

⁷¹Saleng, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 30 Agustus 2021.

⁷² Munir, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun jampue 30 Agustus 2021.

nelayan ini sangat membantu kebutuhan ku ini”⁷³

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara para informan diatas tidak ada bukti atau dokumen yang perlu di isi karena pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan pemerintah keluran masyarakat nelayan dapat merasakan dampak kebijakan tersebut sehingga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat nelayan.

Hal ini diungkapkan karena ia beranggapan bahwa sebelum mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat nelayan sangat sulit meningkatkan perekonomiannya. program pemberdayaan nelayan yang dilakukan pemerintah itu dalam meningkatkan ekonomi keluarga di dusun jampue Kabupaten Pinrang, pelatihan, bantuan alat tangkap, dan sosialisai. dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat nelayan sehingga beberapa masyarakat nelayan pendapatanya sedikit meningkat. Karena sebelum pendapatan sebelumnya tidak stabil mungkin adanya pemberdayaan masyarakat nelayan itu banyak nelayan melakukan pekerjaan sampingan untuk membantu kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

C. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue Berdasarkan Analisis Ekonomi Syariah

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di sektor perikanan dan kelautan sangat penting. Hal ini karena pemerintah memiliki kewajiban untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan memungkinkan mereka untuk mandiri dan hidup jauh dari pemerintah. Gangguan. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat mendorong kemandirian masyarakat, pembangunan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan dengan konsekuensi dan keterbatasan pembangunan dan pemberdayaan pemerintah,

⁷³ Tahir masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 01 September 2021.

masyarakat dapat hidup perlahan dan mandiri untuk memenuhinya.⁷⁴

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak kepala pemerintah kelurahan Lanrisang hasil dari Bapak Firman Sahuddin, S.H. M.AP hasil keterangan wawancara peneliti bahwa:

“Kita akan meningkatkan kesejateraanannya melalui bantuan dari kami selaku pemerintah dengan cara memfasilitasi seperti membuat proposal nanti apabila proposalnya sampai di dinas perikanan dan kelautan, nanti dinas perikanan yang akan menyalukan bantuannya seperti Jps , jaring, mesin, perahu dan lain sebagainya.”⁷⁵

Lanjut yang disampaikan salah satu perangkat pemerintahan kelurahan bahwa:

“Pemberdayaan dilakukan ini dengan nelayan kecil, nelayan tradisonal, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal yang memiliki ketentuan dengan ukuran kecil yang memenuhi standar yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa. dapat dijelaskan tidak adanya bukti tertulis atau dokumen secara resmi yang dibuat alasanya karena pemerintah kelurahan kebijakan yang dimaksud pemerintah keluarahan ini hanya mengeluarkan kebijakan untuk mendapat bantuan hanya melalui proposal saja. Pemberdayaan dilakukan nelayan karena nelayan itu masyarakat kecil. Dan pemerintah kelurahan ingin melaksanakan atau melibatkan semua partisipasi para masyarakat nelayan dalama rangkat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan.

Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status). Ketika orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka menjalankan perannya.⁷⁶ Adapun upaya peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan terdapat pada dimensi peran dalam teori penelitian Haroeputri, Arimbi, Achmad Santoso terdapat

⁷⁴Muham dan Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).h.32

⁷⁵Firman Sahudin, S.H. M.AP Kepala Lurah, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang 08 Septemper 2021

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara 2002), h.243.

tiga aspek dimensi peran:

1. Kebijakan

Kebijakan atau aturan yang dikeluarkan hasil musyawarah atau kesepakatan oleh pemerintah kelurahan dan dinas perikanan dan kelautan dalam memberikan bantuan masyarakat nelayan dusun jampue kec.lanrisang agar pendapatan masyarakat nelayan juga bisa meningkat. Karena kebijakan tersebut hasil musyawarah pemerintah kelurahan dan dinas perikanan dan kelautan terjadi kesepakatan memberikan sebuah bantuan.

Berdasarkan “Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 3 menyatakan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan

- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum”.⁷⁷

Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pemerintah Kelurahan Lanrisang bekerja sama untuk membantu masyarakat nelayan yang ada di Jampue dengan mengeluarkan sebuah kebijakan seperti Proposal. Kebijakan Proposal yang dikeluarkan ini untuk proses mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah masyarakat nelayan di jampue harus membuat kelompok nelayan minimal 10 orang anggota kelompok agar bantuan tersebut bisa dikeluarkan. Seperti:

1. Proposal

Bentuk kebijakan proposal ini merupakan syarat cara pemerintah kelurahan dan dinas perikanan dan kelautan untuk masyarakat nelayan di jampue mendapatkan bantuan nelayan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sekertaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang berdasarkan dari hasil keterangan wawancara peneliti bahwa:

“Kebijakan dari Dinas Perikan dan Kelautan yang diberikan untuk masyarakat nelayan yaitu mereka harus membuat proposal terlebih dahulu dan membuat kelompok untuk membuat kelompok itu minimal sepuluh anggota dalam satu kelompok, apabila proposal itu sudah ada kemudian di bawa ke kantor yang ada di daerah tersebut nantinya kantor yang ada di daerah tersebut yang akan membawa ke kantor Dinas Perikanan dan kelautan apabila anggaran yang diminta oleh masyarakat nelayan tersebut besar maka surat bisa dibawa langsung ke kantor pemerintahan kabupaten pinrang. Dimana para masyarakat nelayan biasanya meminta bantuan perahu yang besar diatas 5 Gt dan itu akan ditetapkan juga oleh lokasinya seperti di Jampue Kelurahan Lanrisang.”⁷⁸

Ha senada yang diungkapkan oleh Lurah Lanrisang Bapak Firman Sahuddin,

⁷⁷Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*.”

⁷⁸Ir. Agustina Torang, Sekertaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang 06 Septemper 2021

S.H, M.AP hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

“Kita akan meningkatkan kesejateraanannya melalui bantuan dari kami selaku pemerintah dengan cara memfasilitasi seperti membuat proposal nanti apabila proposalnya sampai di dinas perikanan dan kelautan, nanti dinas perikanan yang akan menyalukan bantuannya seperti Jps , jaring, mesin, perahu dan lain sebagainya.”⁷⁹

Berdasarkan dari hasil kedua wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan kab. Pinrang bekerja sama dengan kantor Pemerintahan Kabupaten Pinrang dan Kelurahan lanrisang dalam membantu masyarakat nelayan di Jampue dengan mendampingi para nelayan dalam mengurus atau memfasilitasi untuk medapatkan bantuan, dimana kami selaku Pemerintah akan membantu masyarakat nelayan di Jampue agar mereka dapat meningkatkan perekonomian di dalam kehidupan sehari-harinya.

2. Strategi

Strategi adalah istilah yang sering disebut dengan “taktik” dan secara linguistik dapat diartikan sebagai “berkaitan dengan pergerakan organisme dalam menanggapi rangsangan eksternal” (berkaitan dengan pergerakan jaringan dalam menanggapi rangsangan eksternal). Strategi disisi lain, secara konseptual dapat dipahami sebagai salah satu garis besar tindakan untuk mencapai tujuan.⁸⁰

Strategi yang dijalankan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan adalah dengan mengoptimalkan Kegiatan yang ada dengan bertujuan tersedianya sarana perikanan tangkap nelayan kecil dan terlaksananya pendampingan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan kecil.

⁷⁹Firman Sahudin, S.H. M.AP Kepala Lurah, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 08 September 2021

⁸⁰Sondang P. Siagaan, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h.15

Tabel.4.4. Data kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang

No	Sasaran kegiatan	Indikator kerja	Target
1	Tersedianya sarana perikanan tangkap nelayan kecil	a. Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan fasilitas sarana perikanan	122 (KUB)
2.	Terlaksananya pendampingan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan kecil	a. Jumlah nelayan yang terlatih teknologi penangkapan ikan. b. Jumlah nelayan yang mendapat pelatihan pembengkelan mesin penangkapan ikan	100 orang 75 orang

Sumber data : Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang 2018

Dalam mengoptimalkan nilai tambah perikanan pemerintah juga fokus terhadap masalah kesehatan lingkungan dan ikan dengan tersedianya informasi sebaran hama dan penyakit ikan dan terlaksananya pengujian kesehatan ikan dan lingkungan.

Tabel 4.5. Data kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Tersedianya informasi sebaran dan ikan	a. Jumlah Lokasi yang dimonitoring sebaran hama dan	6 Kawasan 12 Laporan

		penyakit ikan	
2	Terlaksananya pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	a. Jumlah orang yang dilayani pengujian kesehatan ikan dan Lingkungan	40 Orang

Sumber Data: Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang 2018

Peningkatan jumlah benih ikan serta terpenuhinya sarana perbenihan dan PAD Balai Benih Ikan juga merupakan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.6. Data kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan jumlah benih ikan	a. Jumlah produksi benih ikan	15.000.000 ekor
2.	Terpenuhinya Sarana Perbenihan atau PAD Balai Benih Ikan	a. Jumlah Sarana Perbenihan b. Jumlah benih yang terjual	7 Unit 200.000 ekor

Sumber Data: Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang 2018

Pemerintah kelurahan dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Jampue bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar terhindar dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Adapun kegiatan yang dilakukan pemerintah Kelurahan Lanrisang untuk nelayan di jampue seperti:

a. Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap

Pemerintah Kelurahan Lanrisang dalam menjalankan tugas untuk

pemberdayaan masyarakat nelayan telah melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap kepada nelayan agar diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan disisi lain juga tetap menjaga lingkungan laut agar tetap lestari.

Hal ini diungkapkan oleh Lurah Lanrisang Firman Sahuddin, S.H. M.AP.

mengatakan bahwa :

“Jadi ada istilah KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan kita melakukan sosialisasi alat tangkap dengan menggunakan alat dan teknologi modern. ini merupakan salah satu cara agar nelayan dapat menggunakan cara yang modern dan lebih efektif.”⁸¹

Kelompok Usahan Bersama (KUB) merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa masyarakat nelayan yang ada di Jampue diberikan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang modern seperti GPS dan alat seperti roket yang bertujuan agar menangkap ikan lebih efektif dan efisien.

Dari sisi pemasarannya pemerintah kelurahan juga akan memfasilitasi hasil tangkapan nelayan untuk segera dipasarkan. Sebagaimana di jelaskan oleh staf kelurahan Masri S.E bahwa:

“Kita akan memfasilitasi hasil tangkap nelayan kemudian hasil tangkapannya itu langsung dipasarkan secara gampang nya itu langsung dengan ikan yang utuh dan masih segar karena menjadi nilai ekonomis mi itu dan ada juga melalui dengan pengolahan ikan.”⁸²

Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan masyarakat nelayan dengan menjual langsung ikan yang masih segar sehingga harga ikan tersebut juga masih normal dan memiliki nilai tambah di mata pembeli.

b. Pendampingan Nelayan

Pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat nelayan melakukan pendampingan kepada masyarakat nelayan untuk

⁸¹Firman Sahuddin S.H. M.AP, Kepala Lurah, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 14 Januari 2022.

⁸²Masri S.E, Staf Kelurahan, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang,08 September 2021.

dapat mendapatkan fasilitas dan bantuan lain dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Lurah Lanrisang Firman Sahuddin, S.H, M.AP, mengatakan bahwa:

“Kami juga akan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memperoleh bantuan dan fasilitas baik pengadaan yang ada di daerah ataupun bantuan dari pusat dan izin-izinnya.”

Pemerintah kelurahan juga memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengurus izin-izin yang diperlukan dalam pemberdayaan nelayan. Dan hal senada disampaikan oleh bapak Tahir salah satu nelayan di Jampue bahwa :

“Kami kalau ingin mengajukan proposal di pemda pasti sosialisasi dulu di kantor lurah agar diberi bantuan semacam pendampinganlah agar kita lebih mudah dalam mengajukan bantuan atau izin.”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan masyarakat dapat terjalin dengan baik dimana pemerintah memberikan sosialisasi dan pendampingan sedangkan masyarakat juga melaksanakan haknya dengan baik sesuai prosedur guna dapat meningkatkan kualitas pendapatan mereka sebagai seorang nelayan.

3. Komunikasi

Komunikasi adalah proses mengkomunikasi pemahaman individu. Semua masyarakat manusia didasarkan pada kemampuan manusia untuk menyampaikan niat, keinginan, emosi, pengetahuan, dan pengalaman dari satu orang ke orang lain. Komunikasi pada dasarnya adalah fokus perhatian dalam situasi perilaku dimana mengirim pesan kepada penerima, dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima.⁸³

Komunikasi digunakan sebagai sarana atau alat untuk memperoleh masukan berupa informasi untuk proses pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan pada

⁸³Fraizer, moore, HUMAS Membangun Citra Dengan Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya 2004) h.86

gagasan bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi masyarakat merupakan masukan yang berharga untuk membuat keputusan yang cepat dan bertanggung jawab. Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti kepada pemerintah kelurahan menjelaskan bahwa komunikasi yang dimaksud tersebut ialah:

- a. Sosialisasi menggunakan teknologi modern
- b. Sosialisasi bantuan alat tangkap

Seperti halnya yang di jelaskan oleh Firman Sahuddin S.H. M.AP sebagai Lurah Lanrisang hasil keterangan wawancara, mengatakan bahwa:

“Kita sosialisasi kita berikan penjelasan kepada masyarakat nelayan, bagaimana supaya di bisa bekerja di sebagai profesinya nelayan seperti dengan cara menggunakan teknologi yang moderen. Kemudian yang kedua itu kita berikan bantuan alat tangkap seperti bilnet, mesin perahu, perahun dan lain sebagainya”⁸⁴

Kemudian pemerintah kelurahan juga akan mengeluarkan program terbaru untuk memberdayakan masyarakat nelayan. Seperti yang dijelaskan oleh Firman Sahuddin S.H M.AP sebagai Lurah Lanrisang hasil keterangan wawancara, mengatakan bahwa:

“Program terbaru kami nanti dimana kami akan memfasilitasi mengenai sertifikat kediaman atau perumahan jadi salah satu cara untuk membantu masyarakat nelayan supaya nelayan bisa sejahtera.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kelurahan dimana pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bagaimana cara menggunakan teknologi yang moderen seperti saat ini dan menspsialisasikan pemeberian bantuan alat tangkap yaitu bilnet, mesin perahu, perahu dan lain sebagainya.

Adapun berdasarkan dari “Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik

⁸⁴Firman Sahudin S.H.,M.AP Kepala Lurah, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang 08 September 2021.

Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 menyatakan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil Pasal 1 ayat (1) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil pembudidaya ikan kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik”.

Adapun upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam penelitian ini menurut Sumodingrat di tinjau dari tiga aspek:

1. *Enabling* (Menciptakan)

Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat dikembangkan. Bahwa sesungguhnya setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya.⁸⁵ Seperti yang di ungkapkan oleh Firman Sahudin S.H selaku Kepala Lurah di Kelurahan Lanrisang yang menyatakan bahwa:

“Dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat nelayan ini bagi masyarakat nelayan sebelumnya ada pelatihan yang di adakan, awalnya pelatihan ini seperti penggunaan alat tangkap moderen, pembuatan jaring, dan lain sebagainya. Kemudian itu pengenalan tentang sosialisasi yang di adakan di kantor. Disampaikan bahwa pembedaan pemberdayaan ini ada program kerja yang di jalankan dan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan potensinya dan menambah pendapatannya. Adapun program pemberdayaan nelayan di jalankan pemerintah kelurahan yaitu pelatihan, sosialisasi, dan bantuan.”⁸⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di lakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa upaya program pemberdayaan nelayan untuk menciptakan pemberdayaan untuk masyarakat. Dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan

⁸⁵Munawar Noor, *Pemberrdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1, No.2 Juli 2011.

⁸⁶Firman Sahudin, S.H. M.AP Kepala Lurah *wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang tanggal 23 Februari 2021.

kesejahteraannya.

2. *Empowering* (Menguatkan)

Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dalam rangkai ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya memanfaatkan peluang yang membuat masyarakat semakin berdaya.⁸⁷ Dalam hal ini penyediaan yang dilakukan Pemerintah Kelurahan yaitu menyediakan alat bantuan tangkap yang diperlukan nelayan yang dijalankan program nelayan ialah bantuan alat tangkap. Adapun hal penyediaan input ini dimana pemerintah kelurahan dalam menjalankan program pemberdayaan nelayan ini pemerintah telah menyediakan bantuan alat tangkap yang disediakan agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

Seperti hal yang diungkapkan oleh salah satu staf kelurahan hasil keterangan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa:

“dengan alat bantuan tangkap ini yang sudah disediakan seperti perahu, mesin, kilo, jaring dan alat tangkap lainnya serta memberikan pemahaman kepada nelayan cara menggunakan alat teknologi moderen untuk mempermudah para nelayan dalam menggunakan alat tersebut”.⁸⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dilakukan pemerintah dalam untuk masyarakat nelayan dimana dapat menguatkan potensi yang dimiliki masyarakat seperti adanya penyediaan bantuan alat tangkap yaitu perahu, mesin, jaring, kilo dan sebagainya.

⁸⁷Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1, No.2 Juli 2011.

⁸⁸Masri, S.E Kabi Pembangunan wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 23 february 2022.

3. *Proecting* (Perlindungan)

Melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemngambilan keputusan yang menyangkut diri masyarakat.⁸⁹ dengan penelitian ini perlindungan yang dimaksud dimana melindungi masyarakat nelayan yang lemah dan melindungi sarana hasil penangkapan, dalam hal ini diungkapkan oleh salah satu perangkat kelurahan bahwa:

“Program- program nelayan seperti pelatihan, sosialisasi, dan pemberian bantuan dimana untuk membantu masyarakat nelayan dalam hal peningkatan perekonomian dan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan dari kondisi yang lemah atau kurang mampu. Hal ini ialah bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang perlindungan yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam memberdyakan ekonomi masyarakat nelayan dengan berbagai program-program nelayan sesuai apa yang telah di canangka pemerintah daerah dengan kondisi yang ada pada masyarakat nelayan.

1. Tahap- tahap pemberdayaan

a. Tahap Penyandaran

Tahap penyandaran atau perilaku menahan diri dari pergeseran adalah perilaku sadar dan welas asih yang menanamkan dalam diri mereka perlunya pemberdayaan.⁹¹ Tahap seperti yang dilakukan untuk upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar tercipta manusia yang memiliki pola pikir yang maju dan modern yakni pada kemampuan diri sendiri dan mandiri. Pemerintah Kelurahan mangajak para masyarakat nelayan untuk mengubah pola pikir masyarakat nelayan seperti masyarakat yang mulai berkembang. Seperti halnya di sampaikan oleh

⁸⁹Muhammad Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1, No.2 Juli 2011.

⁹⁰Nurmiyanti Staf Kelurahan wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 23 Februari 2022.

⁹¹Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru 2012), h. 34.

perangkat kelurahan mengatakan bahwa:

“Dengan tahap ini kami memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan untuk bisa berkembang dengan ini kami pemerintah telah mengeluarkan program-program nelayan seperti pelatihan, sosialisasi, dan bantuan. Dalam program ini kami memberikan pendampingan untuk masyarakat nelayan agar dapat berkembang”⁹²

Berdasarkan hasil pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan tahap penyadaran ini pemerintah kelurahan memberikan pemahaman kepada nelayan yang dibuat agar masyarakat nelayan dapat mengerti dengan isi pemberdayaan ini dan memberikan informasi yang cukup. Dan informasi tersebut dapat tersampaikan secara aktual dan akurat.

b. Tahap Transformasi

Tahap transformasi ini pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pemerintah Kelurahan memberikan sesuatu yang akan menguntungkan para masyarakat nelayan di jampun untuk meningkatkan skill nelayan. Tahap pemberdayaan tersebut ini memberikan informasi kepada masyarakat nelayan di jampun dimana pentingnya mengikuti program tersebut. Seperti halnya yang di ungkapkan salah seorang nelayan bahwa:

“Dengan ini kami mungkin merasa terbantu dengan adanya program pendidikan dan pelatihan ini. Dulu biasanya kami hanya mengandalkan ketarampilan kami saja dengan berdasarkan apa saja yang saya tahu, tetapi adanya pelatihan ini mereka sudah mengetahui tentang cara-cara seperti merawat mesin kapal dengan baik dan menyalakan perahu dengan tepat.”⁹³

Akan masyarakat nelayan yang tidak mengikuti atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan seperti yang diungkapkan salah satu nelayan oleh hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

““Bagi yang tidak pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan ini karena tidak mengetahui tentang adanya program ini. Sehingga mereka tidak

⁹²Masri S.E Kabi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 23 Februari 2022

⁹³Firman Sahudin S.H.M.AP Kepala Lurah, wawancara di kantor kelurahan lanrisang 10 September 2021.

mengetahui cara-cara seperti menangkap ikan, merawat mesin dan lain sebagainya. Saya hanya mengandalkan kemampuan yang saya tau saja seperti kalo saya pergi melaut saya hanya mencukupi kebutuhan dirumah saja.”⁹⁴

Berdasarkan hasil yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Lanrisang dengan Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa pemerintah setempat berupaya untuk memberikan segala perhatian kepada masyarakat nelayan dimana pentingnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat nelayan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual

Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.⁹⁵ Pada tahap yang dilakukan ini dimana masyarakat nelayan memperlihatkan kemampuannya yang terlepas dari pelatihan yang sudah diberikan. Dengan semangat yang diberikan oleh pemerintah kelurahan memungkinkan para nelayan baik individu dan kelompok mampu melakukan sesuatu yang baru selepas mengikutu program-program nelayan. Seperti yang diungkapkan salah satu nelayan di Jampue bahwa:

“Program pemberdayaan nelayan ini dimana kami diberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan alat tangkap yang moderen dengan sesuai kemampuan yang kami miliki para nelayan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberian pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas kami yang miliki para nelayan”⁹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dimana untuk melindungi ekonomi yang lemah seperti melalui program-program pemberdayaan nelayan sebagai bentuk wadah yang bagi masyarakat nelayan dalam meningkatkan pendapatannya. Tujuan dari program tersebut sebagai upaya untuk melindungi

⁹⁴Nurmiyati, Staf Kelurahan, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 09 September 2021.

⁹⁵Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru 2012), h. 34.

⁹⁶Kadi, Masyarakat Nelayan wawancara di Dusun Jampue 20 Januari 2022.

masyarakat nelayan dimana dapat meningkatkan kesejahteraan, perekonomian masyarakat nelayan sehingga nantinya juga dapat dirasakan semua lapisan masyarakat yang ada di kelurahan lanrisang.

Adapun hal ini telah disusun oleh pemerintah kelurahan lanrisang tentang program-program pemberdayaan masyarakat nelayan di jampue yaitu:

1) Pelatihan

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan tingkah laku para masyarakat agar bisa menjalankan suatu pekerjaan dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya pemerintah kelurahan lanrisang untuk masyarakat nelayan dusun jampue kabupaten pinrang dalam memberdayakan masyarakat nelayan dengan melalui dari Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten pinrang dengan melaksanakan kegiatan seperti kompetensi dan spesifikasi yang telah dimiliki oleh masyarakat nelayan. Sama halnya dikatakan oleh Lurah anrisang Firman Sahudin S.H. M.AP hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

“Dengan rangka melakukan penyelenggaraan tentang pemberdayaan masyarakat nelayan tentunya kami akan melakukan dengan sesuai keahlian dan kompetensi atau dengan pekerjaan yang telah diketahui para masyarakat nelayan tetapi belum mengetahui dengan baik cara penangkapan dan penanganan ikan dengan baik dan tepat.”⁹⁷

Dengan menyelesaikan tentang kualitas sumberdaya manusia, masyarakat nelayan telah melakukan segala bentuk upaya untuk mengikuti penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan ini yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan tersebut seperti pemberdayaan SDM nelayan dengan bentuk membimbing para

⁹⁷Ir. Agustina Torang Sekertaris Dinas Perikanan dan Kelautan, wawancara di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang 06 September 2021.

nelayan yang mengetahui tentang teknis mesin dan juru mudi.

Sama halnya yang seorang nelayan dari hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

“Dengan ini kami mungkin merasa terbantu dengan adanya program pendidikan dan pelatihan ini. Dulu biasanya kami hanya mengandalkan ketarampilan kami saja dengan berdasarkan apa saja yang saya tahu, tetapi adanya pelatihan ini mereka sudah mengetahui tentang cara-cara seperti merawat mesin kapal dengan baik dan menjalangkan perahu dengan tepat.”⁹⁸

Tetapi dilain pihak dimana masyarakat nelayan yang tidak mengikuti atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan seperti yang diungkapkan salah satu nelayan oleh hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

“Bagi yang tidak pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan ini karena tidak mengetahui tentang adanya program ini. Sehingga mereka tidak mengetahui cara-cara seperti menangkap ikan, merawat mesin dan lain sebagainya. Saya hanya mengandalkan kemampuan yang saya tau saja seperti kalo saya pergi melaut saya hanya mencukupi kebutuhan dirumah saja.”⁹⁹

Berdasarkan hasil observasi diatas tidak adanya bukti yang tertulis atau dokumen secara resmi yang dibuat hanya saja perjanjian yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Lanrisang dengan Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa pemerintah setempat berupaya untuk memberikan segala perhatian kepada masyarakat nelayan dimana pentingnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat nelayan. Seperti masyarakat nelayan yang sempat hadir dalam program pelatihan dan pendidikan atau bimbingan yang berdampak langsung dalam produktivitas peningkatan pendapatan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

2) Sosialisasi

⁹⁸Firman Sahudin S.H.M.AP Kepala Lurah, wawancara di kantor kelurahan lanrisang 10 September 2021.

⁹⁹Nurmiyati, Staf Kelurahan, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 09 September 2021.

Secara etimologi, sosialisasi berarti upaya mengsosialisasikan sesuatu agar diketahui, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.¹⁰⁰ Berdasarkan data hasil wawancara peneliti Sosialisasi Pemerintah Kelurahan tentang Program Pemberdayaan masyarakat nelayan berarti proses yang dilakukan pemerintah kelurahan untuk menyebarluaskan tentang program-program pemberdayaan masyarakat nelayan supaya masyarakat nelayan memahami atau mengenal lebih luas tentang program pemberdayaan ini.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Lurah Lanrisang Bapak Firman Sahudin S.H. M.AP hasil keterangan wawancara peneliti bahwa:

“Kami mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan bagaimana cara penangkapan ikan dilaut dengan benar dan sesuai dengan aturan.karena ada itu tidak sesuai dengan aturan seperti bom ikan, kemudian dia pakai cangkan harimau dilarang semua itu. Jadi kita berikan pemahaman kepada nelayan supaya sesuai aturan itu caranya menangkap ikan.”¹⁰¹

Sama halnya diungkapkan salah satu perangkat kelurahan bahwa:

“Iya kami memberitaukan kepada masyarakat nelayan dengan cara menangkap ikan dilaut dengan benar dan baik karena itu kami memberikan pemahaman kepada nelayan supaya tidak melanggar aturan.”¹⁰²

Berdasarkan hasil keterangan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kelurahan memberikan arahan kepada nelayan dalam hal menangkap ikan dengan baik dan tidak merusak kondisi sumber laut.

Hal senada yang di ungkapkan perangkat kelurahan hasil keterangan mengatakan bahwa:

“Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bagaimana caranya itu menangkap ikan dengan benar dan tidak menyalahi aturan.”¹⁰³

¹⁰⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2008)h.1085.

¹⁰¹Firman Sahudin S.H. M.AP Kepala Lurah, *Wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang 08 September 2021.

¹⁰²Masri S.E Kabi Pembangunan, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang 10 September 2021

¹⁰³Nurmiyati Staf Kelurahan, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang 10 September 2021.

Lanjut hal yang sama di jelaskan salah satu perangkat kelurahan bahwa:
 “Iya program kami itu untuk nelayan ada salah satunya itu sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ni tujuannya itu kita menyampaikan kepada masyarakat nelayan bagaimana itu cara penangkapan ikan dengan betul dan benar dan tidak melanggar aturan seperti melakukan bom ikan dan lain sebagainya.”¹⁰⁴

Dari hasil data wawancara peneliti di atas bahwa yang dilakukan pemerintah kelurahan bahwa tidak ada bukti atau dokumen yang perlu di isi karena yang dilakukan pemerintah kelurahan memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan cara penangkap ikan yang benar dan baik. Karena ada cara penangkapan ikan itu yang melanggar aturan-aturan seperti melakukan bom ikan. Dengan ini peran pemerintah kelurahan dapat dilihat bahwa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang telah di susun oleh pemerintah baik dalam bentuk pemberdayaan fisik maupun non fisik dan program –program bantuan yang telah di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan di Jampue.

3) Bantuan

Pemberian bantuan seperti alat tangkap ini juga sangat penting untuk para nelayan. Dengan adanya bantuan alat tangkap ini pendapatan ekonomi masyarakat nelayan bisa meningkat, dimana pemerintah daerah kabupaten Pinrang telah memberikan bantuan modal baik berupa uang tunai maupun berupa barang seperti alat tangkap nelayan sesuai dengan permintaan yang ada diproposal permohonan bantuan.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Bapak Firman Sahudin hasil wawancara peneliti bahwa:

“Pemberian bantuan alat tangkap ini bisa didapatkan dengan cara dari kami dari pemerintah kelurahan akan bekerja sama dengan dinas perikanan dan kelautan yang kami akan berikan untuk masyarakat nelayan dusun jampue seperti dia harus membuat proposal dan membuat kelompok nelayan lalu

¹⁰⁴Rukmana, staf Kelurahan, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 10 September 2021.

proposalnya dibawa langsung ke kantor dinas perikanan dan kelautan apabila anggaran sangat besar suratnya bisa dibawa ke kantor bupati dimana mereka biasanya meminta perahu yang lebih besar seperti 5 Gps, mesin, kilo, jaring dan lain sebagainya. Dan akan ditetapkan oleh lokasinya seperti dusun jampue kecamatan lanrisang.”¹⁰⁵

Sama seperti halnya diungkapkan perangkat kelurahan hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan dengan adanya bantuan berupa alat peralatan tangkap ikan yaitu mesin, perahu, kilo. Dan dengan bantuan akan saya gunakan dengan sebaik mungkin karena bantuan ini juga sangat penting bagi kami para nelayan.”

Hal senada yang diungkapkan sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan hasil keterangan wawancara peneliti, mengatakan bahwa:

“Nelayan itu tidak lagi disalurkan dengan cara tunai, walaupun itu dengan cara tunai, akan tetapi bahwa penyalurannya itu dalam bentuk kelompok nelayan, kami akan memberikan amanah kepada PPL agar membelanjakan dengan sesuai yang ada di isi proposal.”¹⁰⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kelurahan hanya maupun membantu dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat nelayan di jampue meningkatkan perekonomian bukan lagi bantuan dalam bentuk tunai tetapi mereka langsung mendapatkan berupa alat tangkap seperti jaring, perahu, kilo, jps, mesin dan lain sebagainya dengan kebijakan atau bantuan agar masyarakat nelayan dusun jampue bisa terbantu dengan kebutuhan perekonomian sehari-hari mereka. Diharapkan kepada masyarakat nelayan mendapatkan bantuan dapat dipergunakan dengan baik dan maksimal.

Menjalankan peranan juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena di dalam Islam prinsip ekonomi merupakan landasan yang akan

¹⁰⁵Firman Sahudin S.H. M.AP Lurah Lanrisang, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang 06 September 2021.

¹⁰⁶Ir. Agustina Torang Sekretaris Dinas Perikanan Dan Kelautan, *wawancara* di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pinrang 06 September 2021.

membangun kerangka ekonomi syariah yang berlandaskan dengan Al-qur'an dan As-sunnah. Dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha diantaranya:

a) Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar dari segala aktivitas dalam kehidupan manusia. Quraish Shibab menjelaskan bahwa tauhid membuat orang-orang dalam kegiatan ekonomi percaya bahwa setiap kekayaan yang mereka miliki adalah milik Allah. Keyakinan seperti itu membuat Muslim menjelaskan.¹⁰⁷

Implikasi lain dari tauhid dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan pemerintah karena salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk melakukan kegiatan program itu. Kegiatan program pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut dapat memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya.. Dengan demikian masyarakat nelayan akan mendapat keuntungan yang diperoleh tidak hanya beredar salah satu masyarakat nelayan tetapi semua seluruh masyarakat nelayan berhak mengikuti program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b) Amanah

Sifat amanah itu didalam pemerintahan khususnya yang membahas mengenai tentang ekonomi dan bisnis dimana ia memegang peranan yang penting untuk menjalankan sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya salah satunya berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan dia harus benar- benar menjaga amanah yang

¹⁰⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Cet. Ke-13*, (Bandung : Mizan, 2009), h. 410.

telah dipercayakan kepadanya. Firman Allah swt, di dalam Q.S. An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memerikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat.¹⁰⁸

Berdasarkan Penerapan sistem amanah ini oleh pemerintah kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di dusun jampue berdasarkan dari ungkapan kepala pemerintah kelurahan lanrisang tentang peran pemberdayaan masyarakat nelayan. Bahwa:

“Kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui bantuan dari kami selaku pemerintah seperti memberikan bantuan kartu nelayan, jaring , perahu , jps , kilo dan lain sebagainya.”¹⁰⁹

Hal senada yang diungkapkan salah satu perangkat kelurahan menyatakan bahwa:

“Kami akan melakukan agar kesejahteraan nelayan dalam segi perekonomian bisa meningkat seperti kami telah berupaya mengeluarkan program pemberdayaan seperti pelatihan, bantuan alat tangkap. Dan mungkin juga ada beberapa nelayan sudah mendapatkan bantuan yakni kartu nelayan, perahu, kilo, dan lain sebagainya.”¹¹⁰

Dengan demikian peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan dusun jampue telah amanah dalam menjalankan tugas serta kewajibannya selaku pemerintah untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang

¹⁰⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentashihanMushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁰⁹Firman Sahudin, S.H. M.AP Kepala Pemerintah Kelurahan Lanrisang, wawancara 08 September 2021.

¹¹⁰Nurmiyati Staf Kelurahan, wawancara di Kantor Kelurahan Lanrisang 08 September 2021.

membutuhkan walaupun belum semua masyarakat nelayan merasakan bantuan tersebut.

Berbeda halnya di ungkapkan tahir salah seorang hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Saya sudah pernah juga mendapat bantuan tetapi kenapa bantuan itu kayak kubeli karna ku kasih uang Rp.500.000, itu mi saya heran kenapa ada bantuan tetapi ujungnya kayak di beli ji”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa bukti nyata pemerintah beum adai dalam memberikan bantuan untuk masyarakat nelayan dan kenapa juga bisa ada bantuan pemerintah harus dibeli mungkin pemerintah lebih teliti dalam soal itu agar penempatan dalam pembagian program bantuan nelayan ini berada dalam masyarakat yang lebih berhak menerima.

c) Kejujuran

Kejujuran adalah nilai yang sangat penting-penting. Kejujuran adalah salah satu bentuk kecurangan. Menggunakan dan mengambil barang dari luar batas kompensasi yang ditentukan dianggap curang dan dicuri yang keduanya dilarang dalam Islam.

Dalam al-Quran dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah Q.S. At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”¹¹²

Pemerintah kelurahan lanrisang kecamatan lanrisang telah menunjukkan

¹¹¹Sarifudding, masyarakat nelayan, wawancara di Dusun Jampue 02 September 2021.

¹¹²Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

sikap kejujurannya dalam hal untuk mendistribusikan bantuan untuk masyarakat nelayan dusun jampue baik dengan bantuan uang maupun dengan bantuan alat tangkap.

d) Kemaslahatan

Untuk diketahui manfaatnya, dalam sejarah munculnya hukum islam, persoalannya adalah bahwa ‘illat (maslahat atau mendarat) dapat berubah istilah hukumnya ketika hilang. Demikian pula apa yang secara umum diperbolehkan (tidak dilarang), tetapi dilarang oleh undang-undang pada waktu kondisi tertentu (haram) (jika menyebabkan kerugian berikut).

Seperti didalam program pemberdayaan masyarakat nelayan penyalur bantuan harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah meski mengetahui dampak kemashlahatan akan lebih baik jika mereka menyalurkan bantuan tanpa berpedoman pada kriteria atau aturan yang telah di tetapkan. bantuan dikelurahan lanrisang Contohnya, menurut Sekretaris kelurahan lanrisang .

“Yang telah didata dalam pemberdayaan masyarakat nelayan penerimaan atau pemberian bantuan nelayan seperti kartu nelayan dan alat tangkap nelayan tidak boleh mendapat bantuan lagi. Yang diiberikan itu hanya yang belum mendapatkan bantuan itu.”¹¹³

Sama halnya yang diungkapkan salah satu perangkat kelurahan bahwa:

“yang sudah diambil datanya untuk peneerimaan bantuan nelayan itu yakni seperti dia sudah mempunyai kartu nelayan atau bantuan lainnya. Karena yang lebih berhak lagi yang diberikan itu yang belom sama sekali dapat bantuan.”

Program pemberdayaan masyarakat nelayan tentang penyalutran bantuan alat tangkap maupun kartu nelayan terdapat aturan mengenai masyarakat yang telah terdata atau yang telah mendapatkan bantuan tidak boleh lagi diberikan bantuan yang hanya boleh diberikan yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Karena

¹¹³Muhammad Sukri S.Ap, Sekertaris Kelurahan Lanrisang, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lanrisang 08 September 2021.

emerintah tidak dapat memberikan bantuan. karena takut menyalahi aturan yang ada. Dengan kata lain hukum tidak dapat diubah meskipun melihat ‘illat-nya (mashlahat atau madarat).

Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.¹¹⁴ Surah At-Taubah ayat 60, Allah Swt menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هِيَ ابْنُ السَّبِيلِ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ هِيَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sungguh zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui maha bijaksana.¹¹⁵

Berdasarkan fakta sejarah, kategori muallaf dapat dibagi menjadi muslim yang masih rentan terhadap iman dan kafir (non-muslim) yang mengharapkan sesuatu dari mereka. Kategori yang terakhir ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis oleh Rasyid Ridha: 1) orang-orang yang diharapkan untuk percaya dan memperkuat islam di bagian dari muallaf yang diberikan kepada mereka. 2) orang-orang khawatir tentang pebuatannya jahatnya terhadap islam. Jadi bagian yang diberikan kepada mereka diharapkan dapat menenangkan hati mereka dan mencegah mereka melakukan kejahatannya.¹¹⁶

¹¹⁴Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, (Sumater Barat:Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat,2015), Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, h. 77.

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

¹¹⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Karim, Juz 10*, (Mesir: Maktabat al-Manar,

e) Keadilan

Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukannya secara proporsional, setara, atau seimbang. Dalam Al-Qur'an kata-kata tersebut sering bertentangan dengan makna zulm (ketidakadilan) dan itsm (dosa). Di sisi lain, makna keadilan sering diartikan sebagai sikap selalu menggunakan skala yang sama daripada skala yang berganda. Dan sikap inilah yang menjadi ciri mereka yang tidak berpihak pada salah satu kontroversi. Menurut Al-Ashfihani, "keadilan" berarti memiliki hak untuk memperlakukan orang lain, tidak memperlakukan diri sendiri, mengambil apa pun yang menjadi haknya, dan/atau memberikan apa yang menjadi haknya.¹¹⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah : 8 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقْوًا مَعْلَمًا وَلَا تَعْدُوا أَلَّا عَدَلْتُمْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ تَوَاتَّ
قَوْلَهُ إِنَّا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹¹⁸

Prinsip keadilan untuk pemberian bantuan nelayan di dusun jampue ini masih belum sepenuhnya masyarakat percaya karena masih ada masyarakat belum mendapatkan bantuan itu karna pemberiannya bantuannya tidak merata.

Sama halnya di katakan bapak terang dari salah satu masyarakat nelayan yang belum mendapatkan bantuan nelayan.

1928), hlm. 494-496.

¹¹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Cet. Ke-13*, (Bandung : Mizan, 2009), h. 116.

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

“Iya dek saya pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, jujur saya pernah dapat bantuan”¹¹⁹

Hal lain di ungkapkan bapak nurdin salah seorang nelayan menyatakan bahwa:

“Saya juga belum paka pernah mendapat bantuan, na padahal sudah mi na ambil data kk kenapa belum mi ada keluar. Lama sekali mi itu sdahnya na ambil data.”¹²⁰

Sama halnya diungkapkan Morsali seorang nelayan menyatakan bahwa: “saya juga belum pernah mendapat bantuan baik bantuan kartu nelayan atau bantuan alat tangkap”¹²¹

Berbeda halnya di ungkapkan tahir salah seorang hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Saya sudah mendapatkan bantuan nelayan seperti kartu nelayan tetapi setelah ada kartu nelayan ku kenapa masih belum ka menerima bantuan”¹²²

Berdasarkan pemaparan hasil keterangan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat nelayan diatas masih banyak belum menerima bantuan akan tetapi mereka pernah di ada juga sudah dilakukan pendataan dan belum ada keluar bantuan dari pemerintah setempat.

¹¹⁹Terang, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 30 Agustus 2021

¹²⁰Nurdin, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 03 September 2021.

¹²¹Morsali, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 03 September 2021.

¹²²Tahir, masyarakat nelayan, *wawancara* di Dusun Jampue 02 September 2021

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan peneliti sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian masyarakat di Jampue dalam meningkatkan keadaan ekonomi keluarga dimana sumber pendapatannya itu berasal dari petani, tambak, pedagang, PNS atau kerjaaa sampingan lainnya. Akan tetapi masyarakat yang tinggal di Jampue sebagian pendapatannya berasal dari nelayan. Pendapatan masyarakat nelayan di Jampue bisa tergolong keluarga sejahtera II dimana keluarga ini selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu menyisipkan uang ditabung ataupun menyisihkan uang membayar cicilan mereka. Meskipun pemerintah kelurahan telah membentuk program untuk meningkatkan dan menyejahterahkan perekonomian masyarakat, namun ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan.
2. Fakto-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh Pemerintah Kelurahan di Jampue dengan adanya program bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan ini yang dikeluarkan pemerintah masyarakat nelayan sangat terbantu dengan adanya program ini dan masyarakat nelayan juga bisa mampu sedikit menyeimbangkan perekonomian.
3. Peran Pemerintah Kelurahan yang telah membantu kehidupan masyarakat nelayan di Jampue baik yang melalui pemberdayaan seperti adanya program-program nelayan seperti pelatihan, sosialisasi dan bantuan yang telah dibentuk oleh pemerintah walaupun belum sepenuhnya maksimal bagi seluruh masyarakat nelayan di Jampue.

dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue berdasarkan prinsip ekonomi syariah yaitu pemerintah kelurahan telah membantu kemaslahatan umat, adil, jujur dalam mengolah data dana bantuan nelayan dan amanah dalam menyalurkan bantuan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yaitu:

1. Pemerintah Kelurahan

Untuk pemerintah Kelurahan harus lebih terbuka untuk menyampaikan program pemberdayaan masyarakat nelayan agar masyarakat lebih cepat mengetahui program itu, serta lebih teliti lah dalam pemberian bantuan- bantuan.

2. Masyarakat nelayan

Untuk masyarakat nelayan di Jampue yang sudah menerima bantuan program pemberdayaan tersebut, supaya lebih memperhatikan lagi dalam mengelolah dan memanfaatkan dana bantuan secara baik yang sesuai diajurkan oleh pemerintah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melengkapi, meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Jampue berbasis analisis ekonomi syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang sama. Topik, tetapi dengan variabel diskusi dan penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku.

Al-Qur'an Al-Karim

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Prenada Media, 2016.

Abu Hamid al-Gazali, *al- Mustashfa min'ilm al-Ushul* Beirut: Dar al Kutub al-'ilmiyah, 1983.

Ahamad Rizal, *Starategi Kebijakan Untuk Mendorong Kinerja Sektor Kelautan*, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, 2007.

Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan* , Yogyakarta: Gava medika, 2004.

Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*, Jakarta : Bada Penelitian dan Pengembangan Komendagri, 2014.

Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru 2012.

Bruce j. Cohen, *Sosiologi suatu pengantar* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesian*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1 Edisi IV*, Jakarta: Gramedia pustaka utama 2008.

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994.

Fraizer, moore, HUMAS. 2004. *Membangun Citra Dengan Komunikasi Bandung: Remaja Rosdakarya*.

- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta: Humaniora Utama Press 2001.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santoso. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelolah Lingkungan* Jakarta: Walhi.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi II. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- M. Khalil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa Surabaya*: Usaha Nasional Indonesia, 2002.
- M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Cet. Ke-13*, Bandung : Mizan, 2009.
- Mahmud yunus, *kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, t.t.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII; Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Karim, Juz 10*, Mesir: Maktabat al-Manar, 1928.
- Mulyadi, *Polemik Kemiskinan Nelayan* Jogjakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2007.
- Murry R. Spiegel dan Larry J. Stephans. 2015. *Statistik*, Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang "*Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*."

- Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu* Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana).
- Sanapiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial* Cet.V; Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2011.
- Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Literasi Media Publishing.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* Jakarta: Bumi Aksara 2002.
- Sondang P. Siagaan, *Manajemen Strategi* Jakarta: Bumi Aksara,2008.
- Sri Najiatim, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetland International-IP, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta , 2006.
- Sumadyo Samsu, *Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca* Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Todaro,Michael P, dan Stephen. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Wisnu Indrajit dan Soimin.2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, Malang: Intrans Publishing.
- Yunita, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Jurnal dan Skripsi

- Bambang Supriyono, et.all., “*Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. 4.

- Hamdan “*Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jepara dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pesisir*”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2017.
- Jurnal Majid “*Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Tambak Udang putih Di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa kabupaten Pinrang*”, Skripsi STAIN Parepare, parepare 2016.
- Muhammad Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1, No.2 Juli 2011.
- Mursal dan Suhadi. 2015. *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, Sumater Barat:Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1.
- Nurfadhillah T, *Peranan Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Desa Kanje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.
- Zianto, “*Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga*”, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjung pinang.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : RUSMAN

NIM : 17.2400.102

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT NELAYAN DI JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH).

PEDOMAN WAWANCARAN

Kondisi perekonomian masyarakat nelayan di Jampue Kab.Pinrang

Pertanyaan kepada Pemerintah Kelurahan

1. Bagaimana kondisi ekonomi , budaya dan sosial di jampue ?
2. Masyarakat di jampue rata-rata bermata pencahariannya apa?
3. Faktor apa yang saja yang menyebabkan sebaaian masyarakat di jampue memilih profesi nelayan
4. Apa yang menyebabkan sebaaian masyarakat nelayan meiiilih menjadi pelaut?
5. Adakah keahlian khusus yang harus dimiliki seorang nelayan?
6. Bantuan apa yang telah diberikan untuk masyarakat nelayan?
7. Apa pekerjaan anda?
8. Sudah berapa lama bekerja sebagai nelayan?
9. Berapa jam lama waktu anda pergi melaut per hari?

10. Berapa rata-rata pendapatan anda dalam sehari/sebulan?
11. Apakah pendapatan anda seimbang dengan kebutuhan sehari-harinya?
12. Apa anda mempunyai pekerjaan selain nelayan?
13. Apakah dengan adanya pemberdayaan itu anda dapat meningkatkan ekonomi?
14. Adakah kendala lain yang dirasakan selain kondisi perekonomian yang lemah dan tidak pasti?
15. Apakah anda mengetahui program-program pemberdayaan nelayan?
16. Apakah anda pernah menerima bantuan nelayan?

Fakto-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan oleh Pemerintah Kelurahan di Jampue

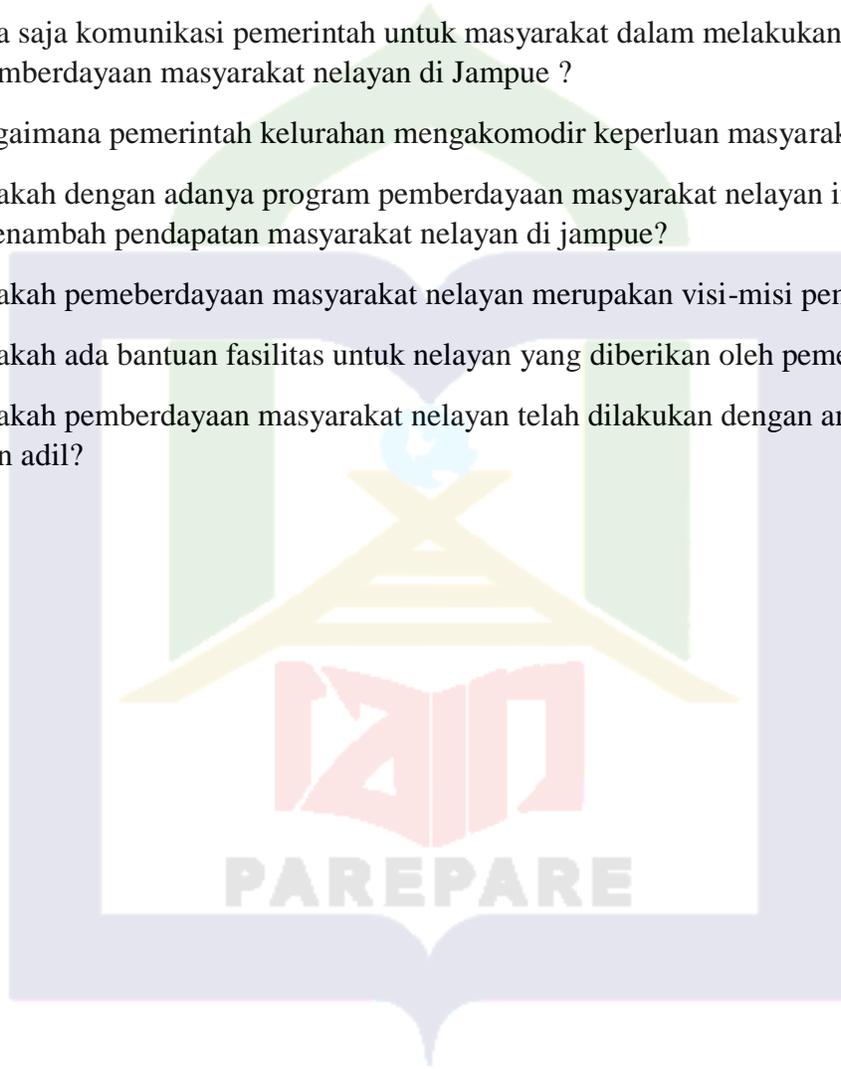
Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana cara pemerintah dalam menetapkan kebijakan terhadap masyarakat nelayan di Jampue ?
2. Apa saja kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat nelayan?
3. Dalam kebijakan yang di keluarkan pemerintah apakah memberi dampak bagi masyarakat nelayan di Jampue?
4. Faktor apa saja yang di perhatikan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan untuk masyarakat nelayan di Jampue?
5. Apakah ada dampak negatif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan?
6. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan di Jampue?
7. Bantuan berupa apa saja yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan di jampue ?
8. Apa saja program-program pemberdayaan masyarakat nelayan ?

Peran Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue Kab.Pinrang berdasarkan ekonomi syariah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan?

2. Program dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah kepadah masyarakat nelayan?
3. Apakah tujuan program pemberdayaan masyarakat nelayan itu?
4. Apa saja strategi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Jampue
5. Apa saja komunikasi pemerintah untuk masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Jampue ?
6. Bagaimana pemerintah kelurahan mengakomodir keperluan masyarakat nelayan?
7. Apakah dengan adanya program pemberdayaan masyarakat nelayan ini dapat menambah pendapatan masyarakat nelayan di jampue?
8. Apakah pemeberdayaan masyarakat nelayan merupakan visi-misi pemerintah ?
9. Apakah ada bantuan fasilitas untuk nelayan yang diberikan oleh pemerintah ?
10. Apakah pemberdayaan masyarakat nelayan telah dilakukan dengan amanah, jujur dan adil?

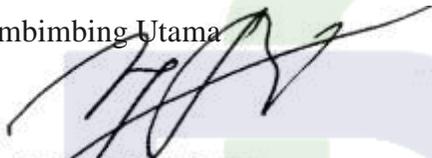


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 31 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Zainal Said, M.H.

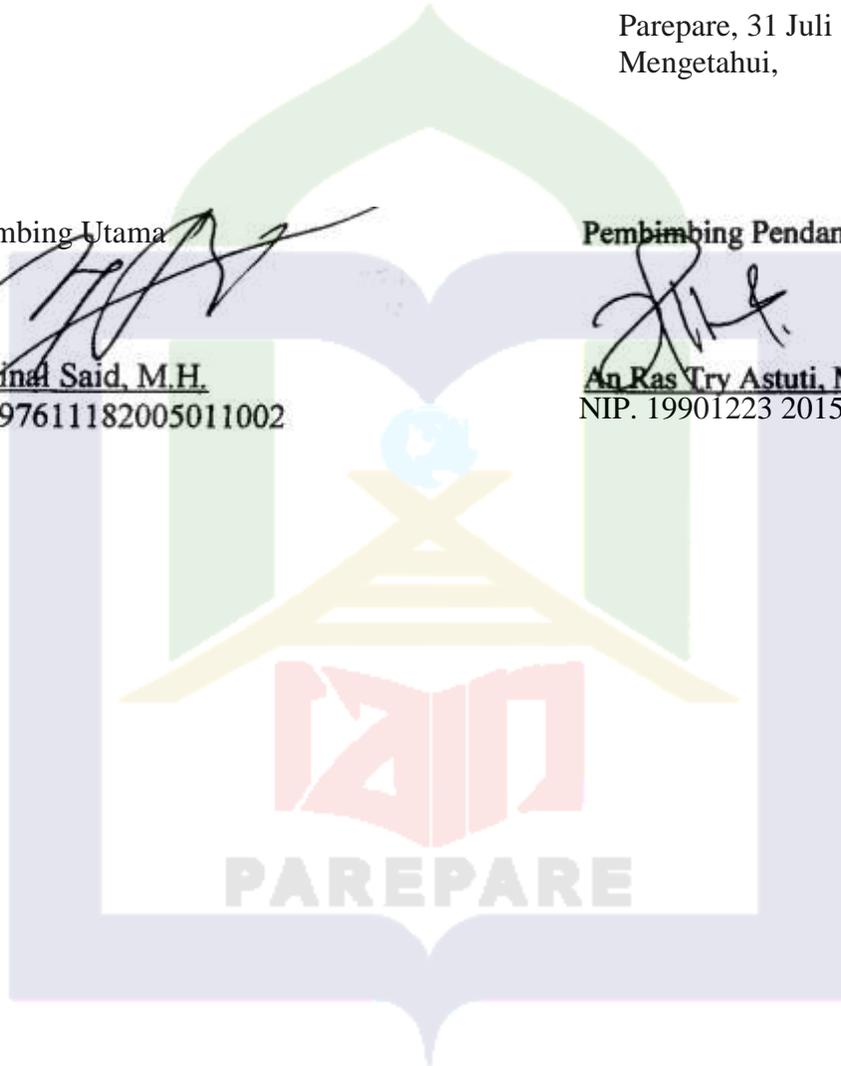
NIP. 197611182005011002

Pembimbing Pendamping



An Ras Try Astuti, M.E.

NIP. 19901223 201503 2 004



DATA MENTAH PENELITIAN

TRANSKRIP WAWANCARA

- Apa Mata pencaharian masyarakat di Jampue?

Jawab: “Kalo mata pencahariannya disini dek rata-rata nelayan hampi 80% masyarakat nelayan”

- Bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan?

Jawab : “kami meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui bantuan kita memmfasilitasi masyarakat nelayan seperti membuat proposal agar mendapatkan bantuan

- Apa dampak bagi masyarakat nelayan dengan kebijakan dari pemerintah di dusun jampue?

Jawab : “kesejahteraan dan perekonomian nelayan bisa meningkat”

- Apa saja program-program pemberdayaan masyarakat nelayan ?

Jawab : “Pelatihan, sosialisasi dan bantuan”

- Apakah dengan adanya kebijakan atau bantuan yang diberikan oleh dinas perikanan kepada masyarakat nelayan dapat meningkatkan ekonomi?

Jawab : “iya dengan adanya program nelayan kami merasa terbantu dalam hal kebutuhan sehari-hari”

- Apa pekerjaan bapak,?

Jawab: “Nelayan”

- Apakah bapak tidak ada pekerjaan sampingan?

Jawab: “Ada”

- Apakah pendapatan anda seimbang dengan kebutuhan sehari-harinya?

Jawab: “ Tidak”

- Apa biasanya kendala apabila tidak pergi memancing?

Jawab: “ cuaca buruk atau mesin kapal rusak”

- Apakah anda mengetahui tentang adanya program pemberdayaan masyarakat nelayan ?

Jawab: “Belum sepenuhnya kami ketahui”

- Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat nelayan memilih menjadi pelaut?

Jawab: “yang menyebabkan sebagian masyarakat di Jampue memilih menjadi pelaut mungkin dengan faktor keadaan karena di Jampue ini sangat strategis untuk menjadi pelaut karena jarak antar laut dan pemukiman sangat dekat”

- Apa masyarakat nelayan dapat menerima kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap program pemberdayaan?

Jawab : “iya tentu kami menerima kebijakan tersebut karena kami memang butuh bantuan

- Program apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan?

Jawab : “bantuan alat tangkap atau jenis bantuan lainnya”

- Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah ?

Jawab : “iya ada”

- Apa tujuan terbentuknya program pemberdayaan nelayan?

Jawab : “ untuk memudahkan nelayan dalam meningkatkan kebutuhan sehari-hari”

- Apakah dengan adanya program pemberdayaan nelayan dapat meningkatkan penghasilan nelayan ?

Jawab: “iya tentu dengan adanya program tersebut masyarakat nelayan dengan mudah meningkatkan penghasilan”

- Bagaimana pendapatan Anda dengan adanya Program pemberdayaan nelayan?

Jawab: “Sangat bagus dengan adanya program pemberdayaan tersebut”

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Rusman

NIM : 17.2400.102

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue ,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : FIRMAN SAHUDIN, S.H
Alamat : KARIANGO
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA DESA / LURAH LAHRISANG

Menerangkan bahwa

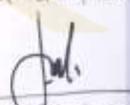
Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 08 - 09 - 2021

LURAH LAHRISANG


NIP. 19600718200011004

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : MASFI, SE
Alamat : KESSIE
Pekerjaan/Jabatan : KASI PEMBANGUNAN

Menerangkan bahwa

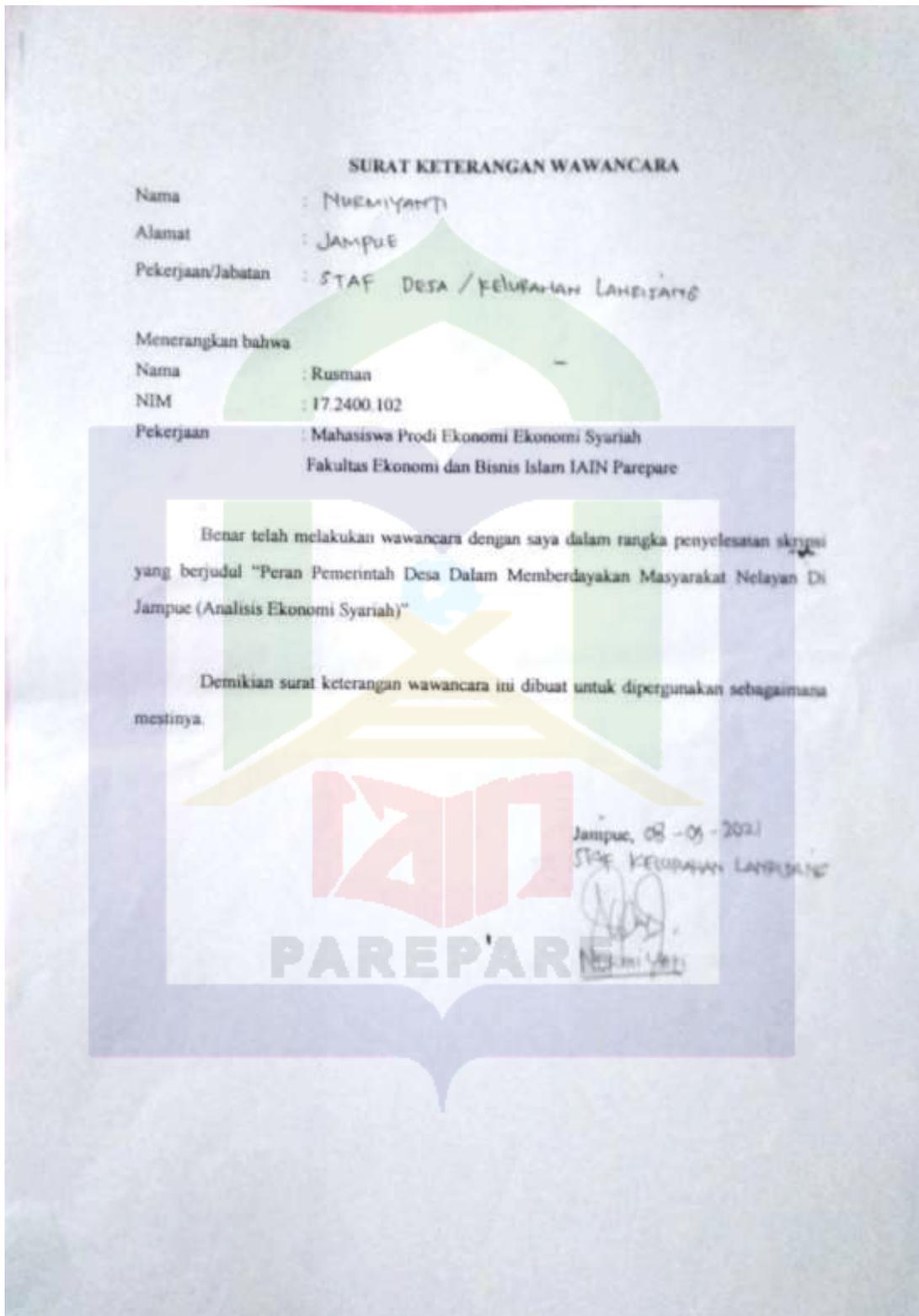
Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 08-09-2021
KASI PEMBANGUNAN
MASFI, SE
NIP. 1972020424072011022

IAIN PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SAHARUDDIN
Alamat : JAMPUE
Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

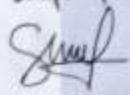
Menerangkan bahwa

Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 02 ~~September~~ September 2021


SAHARUDDIN

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

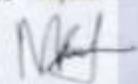
Nama : MUNIR
Alamat : JAMPUR
Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

Memerangkan bahwa
Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampur (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampur, 02 September 2021


MUNIR

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Sardin
Alamat : Jampue
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan

Menerangkan bahwa

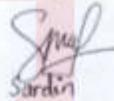
Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 30 Agustus 2021


Sardin

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : GAFFAR
Alamat : JAMPUE
Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

Menerangkan bahwa

Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 30 Agustus 2021


GAFFAR

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *Terang*
Alamat : *Jampue*
Pekerjaan/Jabatan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa

Nama : *Rusman*
NIM : *17.2400.102*
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 30 Agustus 2021

Terang
Terang

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Nurdin
Alamat : Jampue
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan -

Menerangkan bahwa

Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 30 Agustus 2021


Nurdin

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : MUH. TAHIR
Alamat : Jampue
Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

Menerangkan bahwa

Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 30 Agustus 2021


MUH. TAHIR

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SAFIYUDIN
Alamat : JAMPUE
Pekerjaan/Jabatan : NELAYAN

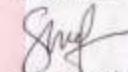
Menerangkan bahwa

Nama : Rusman
NIM : 17.2400.102
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 30 Agustus 2021


SAFIYUDIN

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *JAMAL*
Alamat : *JAMPUE*
Pekerjaan/Jabatan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa

Nama : *Rusman*
NIM : *17 2400.102*
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Ekonomi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Jampue (Analisis Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampue, 30 Agustus 2021

Jamal
JAMAL

**IAIN
PAREPARE**

SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2612/In.39.8/PP.00.9/8/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RUSMAN
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, NOVEMBER 1999
NIM : 17.2400.102
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : ABBANUANG, DESA LERANG, KECAMATAN
LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT NELAYAN DI JAMPUE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 Agustus 2021

Dekan,



Hamid Muhammad Kamal Zubair

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN LANRISANG
KELURAHAN LANRISANG
Jalan : Andi Pawelloi Nomor Telepon (0421) Fax
Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN
Nomor : 96/KL. /TX / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: FIRMAN SAHUDDIN, SH.,M.AP
Pangkat	: Penata Tk.I
N i p	: 19860718 200502 1 004
Jabatan	: Lurah

Menerangkan Bahwa :

N a m a	: BUSMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: Pinrang, 15 November 1999
NIM	: 172400102
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Agama	: Islam
Status	: Belum
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Abbanuang, Desa Lerang Kec. Lanrisang Kab. Pinrang
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Jampue Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Benar telah melakukan melaksanakan penelitian selama kurang lebih 1 Bulan mulai tanggal 20 Agustus sampai 20 September 2021 di Jampue Kec. Lanrisang, dalam rangka penulisan Skripsi demi penyelesaian Program Study Sarjana S1 pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lanrisang, 20 September 2021


FIRMAN SAHUDDIN, SH.,M.AP
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 19860718 200502 1 004

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



RUSMAN lahir di Pinrang, lahir pada tanggal 15 November 1999. Alamat Abbanuang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abd. Rahim dan Ibu Sakka. Penulis memulai pendidikannya di taman kanak-kanak pada tahun 2005 di Tk satu atap 70 Lanrisang, dan melanjutkan sekolah dasar (SD) di SDN 70 Lerang Lanrisang Kabupaten Pinrang sampai pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sampai pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 10 Pinrang dengan Jurusan MIPA sampai pada tahun 2017. dan Melanjutkan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kab.Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”